

**PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM
(Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7
Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit
Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)**

SKRIPSI

Oleh :

HAFIFAH AMINI

NIM : 23 15 3 060



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
1442 H/2021 M**

**PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM
(Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7
Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit
Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Siyasah*

Oleh :

HAFIFAH AMINI

NIM: 23 15 3 060



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
1442 H/ 2021 M**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM
(Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002
Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh
Kecamatan Medan Timur)**

Oleh:

HAFIFAH AMINI

NIM. 23153060


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. M. Iqbal/Irham, M. Ag
NIP. 19711224 200003 1 001

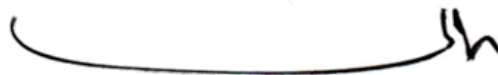
Pembimbing II



Afifah Rangkuti, M. Hum
NIP. 19740527 200901 2 004

Mengetahui

Ketua Prodi Siyasah



Irwansyah, MH

NIP. 19801011 201411 1002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafifah Amini

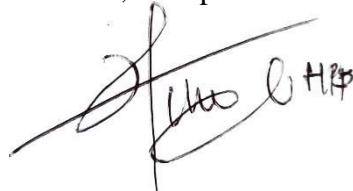
Nim : 23153060

Jurusan/Fakultas : Siyasah/Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan/plagiat dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Medan, 10 April 2021



HAFIFAH AMINI
NIM : 23153060

PENGESAHAN

IKHTISAR

Hafifah Amini, 23153060, Judul: Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur). Dosen Pembimbing Skripsi I : Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag dan Dosen Pembimbing Skripsi II : Afifah Rangkuti, M.Hum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Dinas Perhubungan Kota Medan dalam merealisasikan tugasnya di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Timur. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana aturan tentang pengelolaan lahan parkir dalam Perda No. 7 Tahun 2002, bagaimana aturan retribusi pengelolaan parkir berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2002, bagaimana tinjauan fiqh siyasah dalam pengutipan pajak retribusi parkir.

Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan ini menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah. Transportasi sebagai salah satu pendukung dalam mobilitas penduduk di perkotaan. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki juga semakin meningkat pula, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan mengakibatkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah selaku pelayan publik, untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengaturan arus kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi warga Sumatera Utara.

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan retribusi dan penertiban parkir liar di Kecamatan Medan Timur, dilihat dari penertiban sudah berjalan dengan baik, dilihat dari sisi kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan dan jangkauan perubahan yang diinginkan. Namun, dilihat dari sisi penyetoran retribusi belum adanya kebijakan yang dijalankan. Hal inilah yang menjadi penghambat keberhasilan dari aturan retribusi penertiban parkir liar di Kecamatan Medan Timur karena kurangnya rasa tanggung jawab yang berkuasa serta ketidakpatuhan dari kelompok sasaran penertiban parkir liar.

Kata Kunci : Retribusi, Penertiban Parkir Liar, Ketidakpatuhan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alam, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Di antara salah satu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Arwah Nabi kita Muhammad Saw, para sahabat dan umatnya yang selalau berpegang teguh hingga akhir zaman.

Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini yaitu :

“Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)”.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof. Dr. K.H. Saidurahman, M.Ag** Periode 2015-2020.

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A**
3. Kepada Bapak Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara periode 2015-2020.
4. Kepada Bapak Dr. Ardiansyah LC, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Penulis juga berterima kasih kepada Ibunda **Fatimah, S. Ag, M.A** selaku ketua jurusan Siyasah dan Bapak **Zaid Alfauza Marpaung M.H** selaku sekretaris jurusan Siyasah.
6. Penulis juga berterima kasih kepada Bapak **Dr. Syafruddin Syam, M. Ag** selaku wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum periode 2015-2020.
7. Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada ketua Jurusan Siyasah Bapak **Irwansyah, M.H** dan Ibu **Syofiaty Lubis, S.H, M.H** selaku Sekretaris Jurusan dan seluruh staf pegawai yang telah memberikan kemudahan urusan administrasi.
8. Bapak **Dr. M. Iqbal Irham, M. Ag** selaku pembimbing akademik dan pembimbing I dalam penulisan skripsi ini. Ibu **Afifah Rangkuti, M. Hum** selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulis dengan sabar dan telaten dalam penulisan skripsi ini hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Ibu **Fatimah, MA** selaku penasehat akademis yang telah banyak membantu dalam memberikan sumbangan saran dan pemikiran dalam pengembangan

ilmu dan pengetahuan saya sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

10. Seluruh Dosen dan staf pelayanan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.
11. Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Indra Siregar, S.H selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan bagian Transportasi dan Perparkiran, serta Bapak dan Ibu Staff Dinas Perhubungan Kota Medan yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Petugas parkir di Jalan Sutomo dan petugas parkir di depan Rumah Sakit Murni Teguh. Serta masyarakat yang sudah berkenan membantu penulis dalam proses wawancara.
13. Serta Adik-Adik Peneliti yang Peneliti sayangi yang selalu mensuport penulis yaitu **Nurul Zahra** dan **Muhammad Fahri Harahap**.
14. Kepada teman dekat penulis yaitu **Muhammad Agung Hidayatullah** yang selalu membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan selalu memberikan suportnya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada saudara/i teman-teman seperjuangan penulis yaitu kelas Siyash C yang saling memberikan motivasi mulai dari awal perkuliahan sampai selesainya studi perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
16. Dan kepada seluruh pihak yang terkait yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu dan yang selalu ada bersama penulis mulai dari awal penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dan apabila dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, 10 April 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hafifah Amini' with a stylized flourish at the end.

HAFIFAH AMINI
NIM : 23153060

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Persetujuan	i
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Pengesahan	iii
Ikhtisar	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Jalan	16
1. Jalan Umum	16
2. Jalan Raya.....	18
3. Jalan Tol	20
B. Konsep Parkir	24
1. Parkir Legal dan Parkir Liar	25
2. Lahan dan Pelataran Parkir	27
3. Petugas Parkir	29

BAB III LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Medan Timur.....	30
1. Sejarah dan Geografi Kecamatan Medan Timur	30
2. Wilayah Adminitratif Kecamatan Medan Timur.....	31
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Medan	35
1. Sejarah Terbentuknya Dinas Perhubungan di Indonesia	35
2. Tujuan dan Struktur Dinas Perhubungan Kota Medan	35
3. Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi	36

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Aturan Pengelolaan Pelataran Parkir	41
1. Izin Pengelolaan Pelataran Parkir	41
2. Landasan Hukum Izin Pengelolaan Pelataran Parkir.....	49
3. Instansi Berwenang Mengeluarkan Izin Pelataran Parkir	51
B. Aturan Retribusi Pengelolaan Parkir	55
1. Retribusi, Retribusi Daerah dan Objek Retribusi	55
2. Retribusi Pelayanan Parkir	64
C. Tinjauan Fiqih Siyasah	68
1. Siyasah Dusturiyah	77
2. Siyasah Maliyah	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
Daftar Pustaka	95
Lampiran-Lampiran	

1. Surat Penelitian	99
a. Surat Penelitian Fakultas	99
b. Surat Balasan Dinas Perhubungan	100
c. Surat dari Kantor Walikota Medan	101
2. Peta Lokasi	
a. Kota Medan	102
b. Medan Timur	102
3. Daftar Pertanyaan Wawancara	
a. Kepala Dishub Kota Medan	103
b. Petugas Parkir RS. Murni Teguh	106
c. Petugas Parkir Jalan Sutomo	108
d. Masyarakat	110
4. Dokumentasi	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perparkiran merupakan fenomena yang sering di jumpai dalam sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia khususnya di Kota Medan. Parkir dapat berupa kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak di lakukan penataan dengan baik.¹

Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara merupakan kota metropolitan yang ada di Indonesia. Kota Medan memiliki potensi ekonomi yang besar, hal ini dilihat dari pesatnya perkembangan usaha dibidang perdagangan dan industri. Dengan potensi ekonomi yang besar tersebut, diharapkan tidak menimbulkan masalah-masalah yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Untuk melakukan semua kegiatan, tersebut sudah tentu menggunakan sarana transportasi.

Sarana transportasi yang paling umum digunakan adalah mobil dan motor yang setiap hari jumlahnya terus meningkat sehingga telah membawa dampak terhadap masalah pengaturan parkir yang sering sekali ditemui di Kota Medan. Masalah lalu lintas di Kota Medan erat kaitannya dengan masalah perparkiran. Apabila ada kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang di parkir

¹ Muhammad Nanang Prayudyanto, *Manajemen Parkir di Perkotaan* (Jakarta: GIZ, 2015), hal. 9.

sembarangan di jalan, terutama di kawasan padat lalu lintas, pasti akan menimbulkan kemacetan. Padahal, di kawasan itu sudah ada rambu lalu lintas dilarang parkir. Pembongkaran plang parkir oleh Petugas Satuan Lalu Lintas Polresta Medan bersama Dinas Perhubungan Kota Medan di beberapa ruas jalan yang sangat rawan kemacetan, tujuannya untuk memperlancar arus lalu lintas.

Transportasi memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam perekonomian dan pembangunan di daerah, transportasi sebagai urat nadi (urat darah) yang mengalir ke seluruh bagian tubuh manusia. Salah satu pendukung suatu negara yang maju dan kuat adalah transportasi. Oleh karena itu, transportasi secara nasional, regional dan perkotaan harus di atur, diselenggarakan dan di organisasikan secara kesisteman, agar dapat melayani kebutuhan transportasi secara efektif dan efisien, untuk melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi sosial administrasi pemerintahan dan politik dalam kerangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, berkeadilan dan penunjang serta sebagai fasilitas pendorong. Sebagai fasilitas penunjang, dimaksudkan akan meningkatkan pengembangan berbagai kegiatan di sektor-sektor lain di luar sektor transportasi. Sebagai fasilitas pendorong diharapkan akan membantu membuka daerah-daerah terisolasi.²

Seiring bertambahnya jumlah penduduk di imbangi dengan peningkatan kesejahteraan hidup membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif salah satunya dalam pemilikan kendaraan pribadi. Menurut data Dinas Perhubungan Kota

² Raharjo Adisasmita & Sakti Adji Adisasmita, *Manajemen Transportasi Darat*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, hal.6

Medan pada tahun 2018, tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor rata-rata di Kota Medan mencapai sekitar 12% setiap tahunnya.³ Bertambahnya jumlah kendaraan berimplikasi pada jumlah lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pada beberapa kasus, pihak lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan keuntungan. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir di tempat, dimana di tempat yang mudah dicapai. Kemudahan yang diinginkan tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan. Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara.⁴

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor bersifat sementara.⁵ Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, khususnya Kota Medan. Keberadaan tempat parkir di Kota Medan sangat membantu masyarakat terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan. Oleh sebab itu masalah parkir diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Tempat

³ Bambang, *“Tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Medan”*, (Analisa, 30 April, 2018), hal. 4.

⁴ Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, Jakarta, Gramedia Widiasarana, 2008, hal. 48

⁵ Sunarto. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta, AMUS, 2005, hal. 118

Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan.

Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perizinan Pelataran Parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan perizinan pelataran parkir, jelas dikatakan bahwa tarif untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 1.000,- dan untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 300,- hal yang terjadi dilapangan justru jauh dari harapan. Dilapangan, para petugas parkir menaikkan hingga 200 persen. Tarif kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang semula sebesar Rp. 300,- naik menjadi Rp. 1.000,- dan untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) menjadi sebesar Rp. 2.000,-. Anehnya, kejadian ini telah lama berlangsung tanpa ada penegasan dari para dinas yang terkait. Dengan kata lain, ada kenaikan ilegal hingga 200 persen yang dilakukan oleh penggiat parkir. Ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan yang ditetapkan membuat para pengola parkir semakin memasang ‘aksinya’.⁶

Kemudian mengenai kemana uang parkir tersebut di setorkan, kepada siapa yaitu kepada Dinas Perhubungan (Dishub). Berdasarkan hasil dari analisis data dari masing-masing titik perparkiran di Kota Medan ketika pipegang oleh pihak ketiga. Pihak ketiga selalu menyeter di atas angkat 2 Juta, seperti yang terdapat dari kwitansi Matondang pihak ketiga yang mengelola parkir di Jalan T. Cik Ditiro. Sedangkan untuk di Jalan Uskup Kota Medan dirinya hanya menyeter sebesar 700 ribu saja. Bila dikalikan dari penyeteran uang perparkiran tersebut

⁶<http://www.malangstreetfire.com/read/Opini/3733-Parkir-Liar-Masih-Diantara-Retribusi-Tinggi-dan-Tanpa-Pelayanan>, diakses tanggal 01 Agustus 2019

dikalikan dengan 900 titik parkir, hasil PAD dari perparkiran sudah lebih dari Rp. 1 M Perbulannya.

Kalau tempatnya dipusat-pusat kota tentu pengutipan retribusi biasanya resmi disertai dengan bukti parkir, bagaimana jika tempat tersebut terletak di pinggiran kota yang sudah jelas memiliki lahan sendiri, ketika telah ramai pengunjung ada saja petugas parkir yang mengambil kesempatan untuk mengutip biaya parkir untuk dirinya sendiri.

Bukan masalah tarif parkirnya yang dikeluhkan pengendara akan tetapi pengutipan parkir yang menggunakan halaman sendiri mengapa juga harus dikutip padahal terkadang pengendara hanya parkir untuk waktu beberapa menit saja. Hendaknya instansi terkait perlu kontrol ke tempat-tempat tertentu untuk menindak tegas petugas parkir yang mengutip parkir secara liar agar tidak menimbulkan keresahan bagi pengendara.

Tidak banyak yang tahu kalau parkir di parkiran Tomang Elok (depan Pajak Sei Kambing) Jalan Jendral Gatot Subroto Medan tidak lagi dikenakan biaya alias Gratis. Tetapi kenyataan di lapangan berbeda, satu – dua masih ada juru parkir yang memungut uang parkir sebesar Rp. 2000 untuk sepeda motor. Rupanya, saat pengumuman parkir gratis tersebut sedang terjadi diskusi alot antara Dishub dengan Dispenda.

Persoalan parkir adalah persoalan klasik di kota-kota besar seluruh Indonesia. Tetapi ada satu hal fenomen yang menarik bahwa ternyata di tempat parkir pun kendaraan bisa sangat tidak aman. Dan anehnya, setiap tempat parkir

tertulis bahwa kehilangan bukan tanggung jawab kami atau pihak manajemen tempat tersebut (mall, plaza, ruko dan lain sebagainya). Lalu kalau begitu tanggung jawab siapa, dan apa artinya membayar uang parkir, kalau kendaraan tidak bisa dijaga dengan baik.⁷

Berdasarkan masalah yang terjadi di lapangan, bahwa terdapat satu masalah yang ingin saya angkat yaitu parkir liar di trotoar yang dapat ditemui di Jalan Veteran, Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur lebih tepatnya di Samping Rumah Sakit Murni Teguh Kota Medan. Parkir liar di atas trotoar pejalan kaki menimbulkan kemacetan, hak pengguna jalan di rampas gara-gara parkir liar tersebut. Menurut warga setempat, sempat di tertibkan polisi, namun seminggu kemudian terjadi lagi.

Akibat keberadaan parkir liar ini, ruas jalan semakin menyempit. Pada waktu-waktu tertentu seperti jam makan siang dan jam pulang kantor kerap menimbulkan kemacetan. Apalagi ada beberapa becak motor dan transportasi Online yang mangkal di area titik kemacetan tersebut, maka semakin bertambah macet.

Sementara itu, Manajemen Rumah Sakit Murni Teguh juga mengeluhkan hal serupa. Menurut pihak Rumah Sakit, keberadaan parkir liar menghambat keluar masuk mobil Ambulans. Tidak hanya itu, ada sejumlah oknum dari organisasi tertentu melakukan pungutan liar (pungli) terhadap mobil ekspedisi yang melakukan bongkar muat alat medis di rumah sakit.

⁷ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: ANDI, 2004), hal. 57.

Perda baru Kota Medan menerapkan “Pengelola Parkir Wajib Ganti Kendaraan Hilang”. Hal ini diputuskan sejak rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.⁸

Hal ini tentu saja perlu disambut positif, karena pengelola parkir harus bertanggung jawab mengganti kendaraan yang hilang dilokasi parkir, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 32 Perda Nomor 10 Tahun 2011 telah menetapkan penyelenggara tempat parkir wajib bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan yang hilang akibat kelalaian penyelenggara tempat parkir.

Kebijakan parkir mempunyai tujuan untuk terciptanya ketertiban perparkiran. Semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap ketertiban perparkiran maka dibuatlah peraturan yang dapat meningkatkan ketertiban pengelolaan perparkiran kepada pemakai jasa parkir secara maksimal yaitu melalui peraturan daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perizinan Pelataran Parkir Ditepi Jalan Umum.⁹

Dalam hukum Islam tarif retribusi parkir adalah termasuk *al – kharaj* artinya parkir sebagai lahan bisnis milih umum yang berfungsi sosial, maka berarti bahwa kepentingan masyarakat banyak harus didahulukan dan pemerintah yang mempunyai hak untuk mengelola dan memanfaatkan peluang bisnis tersebut karena termasuk aset negara.

⁸ Rapat Paripurna Dewan pada hari Selasa (8/9), di gedung DPRD Kota Medan.

⁹ Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 tentang *Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*, Bab III Pasal 4, hal. 4

Terdapat kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa :

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعَايَةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحِ

*Artinya : Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.*¹⁰

Dalam ushul fiqh terdapat prinsip al-maslahah al-mursalah, yakni kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.¹¹ Berdasarkan pengertian tersebut di atas, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia.

Dalam Islam prinsip juga menjadi kewajiban yang harus ditanggung oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan dunianya. Akan tetapi, Islam pun menggariskan koridor-koridor peraturan yang wajib ditaati dalam usaha tersebut, diantaranya harus ada kejujuran, adil, transparan, niat baik serta tidak merugikan salah satu pihak.

Sebagaiman firman Allah dalam Surah Asy Syu'ara ayat 183, yang artinya “... dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” Ayat ini menjelaskan tentang seruan Allah kepada hambanya untuk berlaku adil dan larangan Allah agar tidak melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain,

¹⁰ Sayuthi, Abdurrahman as, *Kitab Al-Asybah wa an-Nadhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyah*, DKI Jakarta, Darul Kutub al – Ilmiyah, 2015, hal. 158.

¹¹ Arifin, Miftahul dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah – Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya, Citra Medai, 1999, hal. 142.

apa dan bagaimana pun caranya khususnya dalam penentuan tarif parkir dengan sistem Progressif.

Pada penetapan tarif parkir progresif batas waktu pembayaran di hitung berdasarkan durasi waktu dari 2 (dua) jam pertama dan bertambah pada tiap 1 (satu) jam berikutnya. Perhitungan pada tarif progresif ini dapat dipertanggung jawabkan secara hukum oleh pihak pengelola jasa. Karena dengan alasan menggunakan dasar satuan waktu alternatif (satuan jam) bukan dengan mempersamakan waktu yang berbeda.

Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 (Studi Kasus di Jalan Sutomo dan Rumah Sakit Murni Teguh di Kecamatan Medan Timur)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana aturan tentang pengelolaan lahan parkir dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002?
2. Bagaimana aturan retribusi pengelolaan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah dalam pengutipan pajak retribusi parkir?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1.** Untuk mengetahui aturan tentang pengelolaan lahan parkir dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002.
- 2.** Untuk mengetahui aturan retribusi pengelolaan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002.
- 3.** Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah dalam pengutipan pajak retribusi parkir.

2. Kegunaan Penelitian, yaitu sebagai berikut :

Dalam penelitian ini , penulis memiliki tujuan penelitian diantaranya adalah:

- 1.** Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum tata negara atau fiqh siyasah berkaitan dengan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- 2.** Manfaat secara praktis, diharapkan bermanfaat bagi lembaga penegak hukum, praktisi hukum dan pemerintah agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan prosedur izin pengelolaan pelataran parkir.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field study research*) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹² Riset ini merupakan studi kasus, yaitu membahas tentang retribusi parkir dan parkir liar.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu,¹³ dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2002.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian lapangan, maka tempat penelitian adalah di Kecamatan Medan Timur yaitu di Jalan Sutomo dan di depan Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan (Dishub). Peneliti mengambil tempat penelitian disini karena lokasi ini sesuai dengan studi

¹² Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 5.

¹³ Salim dan Harun, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2016), h. 41.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h.6.

kasus/peristiwa yang telah ada diatas. Waktu penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yakni terhitung mulai September 2019.

3. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah kualitatif, dimana sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier.

a) Data Primer

Merupakan data yang menjadi sumber pokok dalam penelitian ini atau dengan kata lain data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang di teliti yaitu Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Timur seperti di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, di jalan Sutomo dan di depan Rumah Sakit Murni Teguh. Penelitian ini juga dilakukan di ruang lingkup masyarakat.

b) Data Sekunder

Merupakan sumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan di peroleh dengan cara studi pada buku buku, literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian.

c) Data Tersier

Merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, dalam hal ini adalah kamus Ensiklopedia dan internet.

d) Teknik Pengolahan Data

1. Observasi

Yaitu pengumpulan data melalui pengamatan terhadap penomena-penomena yang di teliti juga merupakan pendahuluan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna menjaga penjajakan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum dari lokasi penelitian.

2. Wawancara

Yaitu metode yang berupa tanya jawab secara langsung daftar pertanyaan yang telah direncanakan. Baik dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dilakukan pada informasi yang di pilih sesuai dengan kebutuhan yang memenuhi standart.

Maksud dari wawancara terstruktur adalah yang dilakukan jika penelitian telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan di dapat, penelitian telah menyiapkan data berupa instrumen pertanyaan yang akan di ajukan dan alternatif jawabannya juga telah di ketahui. Dalam wawancara terstruktur ini setiap informasi memperoleh pertanyaan yang sama, mulai dari pertanyaan, kata-katanya dan cara penyajiannya serta pengumpulan datanya. Sementara wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan bebas untuk menggali informasi yang sesuai dan jelas dengan kebutuhan penelitian.¹⁵

¹⁵ Ulber Silahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h.284 .

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dan agar dapat dipahami dengan mudah, maka pembahasan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi konsep jalan yang terbagi menjadi tiga yaitu, jalan umum, jalan raya dan jalan tol. Konsep parkir yang terbagi menjadi tiga yaitu, parkir legal dan parkir liar, lahan dan pelataran parkir juga petugas parkir.

BAB III LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum kecamatan Medan Timur yang dibagi menjadi dua yaitu, sejarah dan goegrafi kecamatan Medan Timur dan wilayah adminitratif kecamatan Medan Timur. Gambaran umum Dinas Perhubungan kota Medan yang dibagi menjadi 2 yaitu, sejarah terbentuknya Dinas Perhubungan di Indonesia, tujuan dan struktur Dinas Perhubungan kota Medan dan tugas pokok, fungsi juga organisasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi aturan pengelolaan pelataran parkir yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu, izin pengelolaan pelataran parkir, landasan hukum izin pengelolaan pelataran parkir dan instansi berwenang mengeluarkan izin pelataran parkir. Aturan retribusi pengelolaan parkir yang terbagi menjadi dua bagian yaitu, pengertian retribusi, retribusi daerah dan objek retribusi, serta retribusi pelayanan parkir. Tinjauan fiqh siyasah yang terbagi menjadi dua bagian yaitu, siyasah dusturiyah dan siyasah maliyah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berisi surat penelitian yang meliputi surat penelitian fakultas, surat balasan Dinas Perhubungan dan surat dari kantor Walikota Medan, peta lokasi yang meliputi peta lokasi kota Medan dan Medan Timur, daftar pertanyaan wawancara yang meliputi pertanyaan wawancara dari kepala Dishub Kota Medan, petugas parkir di rumah sakit Murni Teguh, petugas parkir di jalan Sutomo serta masyarakat dan dokumentasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Jalan

Jalan pada umumnya yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap jalan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.¹⁶ Adapun konsep jalan dibagi menjadi 3 bagian yaitu, jalan umum, jalan raya dan jalan tol.

1. Jalan Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jalan umum adalah jalan untuk orang umum dapat dilalui orang atau pun kendaraan. Sesuai peruntukannya, jalan dibagi menjadi dua, yaitu jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, pengelompokkan jalan umum menurut statusnya, adalah:

Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, atau antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat

¹⁶ Wikipedia Bahasa Indonesia, *Pengertian Jalan*, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan> diakses 04 Maret 2020).

kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Jalan Kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.¹⁷

Sedangkan, jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi badan usaha, perseorangan atau sekelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengelompokkan jalan sesuai kelasnya adalah jalan kelas I, jalan kelas II, jalan kelas III, dan jalan kelas khusus.

Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dengan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (Sepuluh) ton.¹⁸

¹⁷ Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 *tentang Jalan*, Bab III (Peran Pengelompokkan dan bagian-bagian jalan), Pasal 9, hal. 6.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab IV (Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), Bagian Kedua, Paragraf I, Pasal 19, hal. 16.

2. Jalan Raya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jalan raya adalah jalan besar dan lebar, biasanya beraspal, dapat dilalui kendaraan besar (truk, bus) dari dua arah berlawanan. Pada dasarnya pembangunan jalan raya adalah proses pembukaan ruangan lalu lintas yang mengatasi berbagai rintangan geografi. Proses ini melibatkan pengalihan muka bumi, pembangunan jembatan dan terowongan, bahkan juga pengalihan tumbuh-tumbuhan.¹⁹

Jalan raya adalah jalur-jalur tanah diatas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan jenis konstruksinya, sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat. Jalan dalam arti yang luas adalah sepias ruang baik di daratan maupun diatas permukaan air atau diudara yang khusus, patut dan dipergunakan untuk perhubungan lalu lintas antara tempat dipermukaan bumi.²⁰

Perkembangan jalan raya merupakan salah satu hal yang selalu beriringan dengan kemajuan teknologi dan pemikiran manusia yang menggunakannya, karena jalan merupakan fasilitas penting bagi manusia supaya dapat mencapai suatu daerah yang ingin dikehendakinya. Pembuatan jalan raya bertujuan untuk pemerataan perekonomian suatu daerah dan sebagai jalur penghubung antara suatu daerah dengan daerah lain.

Mengingat definisi tersebut, maka jalan dapat dibedakan atas 3 (tiga) jenis yaitu jalan udara yaitu jalan untuk lalu lintas pesawat terbang. Jalan air (laut,

¹⁹ Wikipedia Bahasa Indonesia, *Pengertian Jalan Raya*, (https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_raya, diakses 04 Maret 2020).

²⁰ David M.L Tobing, *Akses Jalan* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, tbk, 2007), hal. 3.

sungai, danau dan saluran) yaitu jalan untuk lalu lintas dengan kapal atau perahu. Jalan darat yaitu jalan yang dipergunakan untuk orang yang berjalan kaki, hewan dan kendaraan di daratan.²¹

Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri berikut. Digunakan untuk kendaraan bermotor. Digunakan oleh masyarakat umum. Digunakan oleh perusahaan Negara. Penggunaannya diatur oleh undang-undang pengangkutan. Jalan raya pada umumnya dapat digolongkan dalam 4 (empat) klasifikasi, yaitu, klasifikasi menurut fungsi jalan, klasifikasi menurut kelas jalan, klasifikasi menurut medan jalan, klasifikasi menurut wewenang pembinaan jalan.²²

Untuk perencanaan jalan raya yang baik, bentuk geometrinya harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga jalan yang bersangkutan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada lalu lintas sesuai dengan fungsinya, sebab tujuan akhir dari perencanaan jalan raya yang baik ini, adalah menghasilkan infrastruktur yang aman, efisien pelayanan arus lalu lintas dan memaksimalkan rasio tingkat penggunaan biaya juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan.²³

Jalan raya (*highway*) adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 lajur setiap arah. Jalan sedang (*road*) adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 lajur 2 arah dengan lebar paling sedikit 7 meter. Jalan kecil (*street*) adalah jalan

²¹ Alamsyah, A. A., *Jalan Raya* (Malang, UMM Press, 2001), hal. 9.

²² Bina marga, 1997.

²³ Muhammad Nurdin, *Evaluasi Tikungan di Ruas Jalan Dekso-Simangaluh, Kabupaten Kulon Progo*, vol 2, hal. 5.

umum untuk melayani lalu lintas setempat paling sedikit 2 lajur 2 arah dengan lebar paling sedikit 5,5 meter.²⁴

3. Jalan Tol

Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi negaranya. Pembangunan jalan Tol Trans Sumatera merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menciptakan percepatan distribusi dan mobilitas perekonomian daerah sekitar.

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan untuk membayar. Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas alternatif, namun dalam keadaan tertentu jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif.²⁵ Pengguna jalan tol dikenakan kewajiban membayar tol yang digunakan untuk pengembalian investasi, pemeliharaan dan pengembangan jalan tol.²⁶ Pengguna jalan tol akan mendapat keuntungan berupa penghematan Biaya Operasi Kendaraan (BOK) dan waktu, dibandingkan apabila melewati jalan non tol. Sementara, Badan Usaha mendapatkan pengembalian investasi melalui tarif tol yang dibayar pengguna jalan tol.

²⁴ Direktorat Jendral Bina Marga, *Tata Cara Perencanaan Geometri Jalan Raya Antar Kota*, hal. 14.

²⁵ Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 44.

²⁶ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 43 ayat (3).

Pembangunan jalan tol dilakukan untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi, meringankan beban pemerintah dan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.²⁷

Manfaat strategis lainnya dari pembangunan jalan tol yakni membuka lapangan kerja skala besar meningkatkan penggunaan sumber daya alam negeri, seperti industri, semen, baja dan jasa konstruksi, mendorong fungsi intermediasi bank, meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah yang dilalui jalan tol sebagai pendorong PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dan memperlancar kegiatan ekspor. Pembangunan jalan tol juga akan memacu kebangkitan sektor riil dengan terjadinya *multiplier effect* bagi perekonomian nasional.²⁸

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2005, jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar. Penyelenggaraan jalan tol bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya. Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dinyatakan bahwa wewenang

²⁷ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan, Pasal 43 ayat (1).

²⁸ Andreas Partogi Pasaribu, *Faktor Penyebab terjadinya Klaim yang Mempengaruhi Kinerja Waktu Proyek Konstruksi Jalan Tol di Jabodetabek*, Jurnal Sosial Ekonomi, Jakarta, Salemba, 2009, hal. 26.

penyelenggaraan jalan tol berada pada pemerintah yang meliputi penyaturan, pembinaan, pengusahaan dan pengawasan.²⁹

Jadi dapat disimpulkan, jalan tol adalah jalan umum yang kepada pemakainya dikenakan kewajiban membayar dan merupakan jalan alternatif untuk jalan lintas dan jalan umum yang telah ada. Jalan tol diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan efisiensi pelayanan distribusi barang dan jasa guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan wilayah dengan memperhatikan rencana induk jaringan jalan.

Investasi dengan pembangunan jalan tol baru akan menyediakan transportasi yang lebih efisien dan memacu investasi sektor lain yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Adapun tujuan dan manfaat strategis pembangunan jalan tol diantaranya adalah sebagai berikut, pembukaan lapangan kerja dalam skala besar, peningkatan penggunaan sumber daya dalam negeri, mendorong kembalinya fungsi intermediasi perbankan ke sektor investasi produktif demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah yang dilalui jalan tol sebagai pendorong meningkatnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan memperlancar ekspor, memacu kebangkitan sektor riil dengan menciptakan efek *multiplier* bagi perekonomian nasional.³⁰

²⁹ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 45 ayat (1 dan 2).

³⁰ Syafatun, *Investasi Dengan Pembangunan Jalan Tol Baru Akan Menyediakan Transportasi yang lebih Efisien dan Memacu Investasi Sektor Lain yang Akan Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan ITB, 2009, hal. 29.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), penggunaan jalan tol di Indonesia dimulai pada tahun 1987 dengan dioperasikannya jalan tol Jagorawi dengan panjang 59 km (termasuk jalan akses yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Pembangunan jalan tol yang dimulai pada tahun 1975 ini, dilakukan oleh pemerintah dengan dana dari anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang pengelolaannya diserahkan kepada PT. Jasa Marga (persero Tbk).

Selanjutnya PT. Jasa Marga ditugasi oleh pemerintah untuk membangun jalan tol dengan pembebasan tanah yang dibiayai oleh pemerintah. Mulai tahun 1987, swasta mulai ikut berpartisipasi dalam investasi jalan tol (sebagai operator jalan tol) dengan menandatangani Perjanjian Kuasa Pengusahaan (PKP) dengan PT. Jasa Marga. Hingga tahun 1987, 553 km jalan tol telah dibangun dan dioperasikan di Indonesia. Dari total panjang tersebut, 418 km jalan tol dioperasikan oleh PT. Jasa Marga dan 135 km sisanya dioperasikan oleh swasta.³¹

Pada periode 1995 hingga 1997, dilakukan upaya percepatan pembangunan jalan tol melalui tender 19 ruas jalan tol sepanjang 762 km. Namun upaya ini terhenti akibat adanya krisis moneter pada Juli 1997 yang mengakibatkan pemerintah harus menunda program pembangunan jalan tol dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 39/1997. Akibat penundaan tersebut, pembangunan jalan tol di Indonesia mengalami stagnansi, terbukti dengan hanya terbangunnya 13,30 km jalan tol pada periode 1997-2001.³²

³¹ Info BPJT, *Sejarah Jalan Tol di Indonesia*. Bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/sejarah. Akses tanggal 20/01/2020.

³² *Ibid.*

Pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden No. 7/1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan infrastruktur jalan. Selanjutnya di tahun 2002, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 15/2002 tentang penerusan proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah juga melakukan evaluasi dan penerusan terhadap pengusahaan proyek-proyek jalan tol yang tertunda. Mulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, terbangun 4 ruas jalan tol dengan panjang total 41,80 km. Pada tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang jalan yang mengamanatkan pembentukan BPJT sebagai pengganti peran regulator yang selama ini dipegang oleh PT. Jasa Marga.³³

Proses pembangunan jalan tol kembali memasuki fase percepatan mulai tahun 2005. Pada 29 Juni 2005, dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol sebagai regulator jalan tol Di Indonesia. Penerusan terhadap 19 proyek jalan tol yang pembangunannya ditunda pada tahun 1997 kembali dilakukan. Di masa yang akan datang, pemerintah akan mendanai pembangunan jalan tol dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pembiayaan penuh oleh swasta, program kerjasama swasta-publik (*Public Private Partnership/PPP*), serta pembiayaan pembangunan oleh pemerintah dengan operasi-pemeliharaan oleh swasta.³⁴

B. Konsep Parkir

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Pengertian di atas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir

³³ Info BPJT, *Sejarah Jalan Tol di Indonesia*, Bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/sejarah. Akses tanggal 20/01/2020.

³⁴ *Ibid.*

yaitu penyedia tempat untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika melihat fungsi dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya menurut Pasal 1694 KUH Perdata.³⁵

1. Parkir Legal dan Parkir Liar

Menurut isi Pasal 1694 KUH Perdata, penitipan adalah suatu perjanjian "*rill*" yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan. Jadi, bentuk dari jasa parkir ini tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang pada umumnya bersifat *konseksual* yaitu sudah dilahirkan pada saat terciptanya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.³⁶

Sehingga parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta

³⁵ Pasal 1694 KUH Perdata tentang Penitipan Barang.

³⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 107.

tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.³⁷

Penggunaan lahan parkir namun tetap memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna untuk memarkirkan kendaraan. Penelitian ini dibatasi pada manuver parkir mobil penumpang (roda empat) berdimensi tidak lebih dari (2,00 m x 5,00 m) dengan kondisi simulasi dilakukan pada pelataran parkir (parkir lot). Penyediaan fasilitas parkir kendaraan pada prinsipnya dapat dilakukan di badan jalan (on-street parking) dan di luar badan jalan (off-street parking). Pada kondisi parkir di badan jalan manuver kendaraan yang hendak memasuki atau meninggalkan ruang parkir berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu-lintas.

Permasalahan parkir di Kota Medan sangatlah minim dan dapat dilihat di lapangan sendiri dimana banyaknya parkir-parkir liar yang bermunculan di Kota Medan ini yang mana badan jalan pun kerap digunakan sebagai lahan parkir dan cenderung pengelolaan parkirnya bekerjasama antara pemilik toko dengan pemerintah serta banyaknya pembangunan ruko-ruko atau pun toko-toko yang mempunyai lahan parkir yang minim yang mana tidak bisa menampung kendaraan pengunjung tokonya sehingga parkirnya pun memakai badan jalan. Pemanfaatan lahan untuk parkir liar ini sebenarnya tidaklah dibenarkan. Akan tetapi, tidak adanya langkah tegas dari pihak pemerintah Kota Medan untuk mengatasi masalah ini padahal hal ini yang cenderung menjadi penyebab utama terjadinya kemacetan di Kota Medan ini. Bertambahnya volume kendaraan dan

³⁷ David M. L Tobing, S.H, M.Kn., *Parkir Perlindungan Hukum Konsumen* (Jakarta, Timpani, 2015), hal. 18.

pembangunan fasilitas-fasilitas pedagang dan pelayanan umum di Kota Medan ini yang tidak diikuti dengan pembuatan lahan parkir, maka menyebabkan ketidakseimbangan antara volume kendaraan dengan lahan parkir yang ada di Kota Medan ini dan bisa dikatakan kota Medan kurang memiliki lahan parkir.

2. Lahan dan Pelataran Parkir

Permasalahan area parkir di wilayah Jalan Sutomo dan di depan rumah sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur merupakan suatu fenomena yang patut untuk ditelaah. Urgensitas kebutuhan lahan parkir menjadi suatu keutamaan ketika lahan yang tersedia tidak mencukupi untuk menampung kendaraan yang memasuki area parkir. Selain perlunya mengevaluasi kebutuhan lahan parkir, evaluasi tentang tingkah keamanan, perilaku, dan fasilitas parkiran juga menjadi hal yang penting.

Adanya evaluasi ini diharapkan memberikan suatu alternatif pemecahan masalah terhadap permasalahan parkiran di wilayah Jalan Sutomo dan di depan rumah sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur. Evaluasi kebutuhan lahan parkiran menunjukkan, luas lahan parkir yang tersedia untuk setiap karakteristik kendaraan tidak mencukupi untuk menampung jumlah kendaraan yang memasuki area tersebut. Fasilitas dan luasan parkiran yang kurang memadai menjadi kendala utama yang saat ini dialami. Hal tersebut didukung oleh hasil analisis kebutuhan lahan parkir.

Dalam Pasal 3 angka 3 Perwal (Peraturan Walikota) Medan Nomor 57 Tahun 2011 dinyatakan bahwa:³⁸

SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak atas penyediaan pelayanan parkir dengan dipungut bayaran, termasuk persewaan lahan parkir dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan fasilitas parkir yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

Pengelola parkir bukan perusahaan asuransi, melainkan perusahaan jasa yang mengelola lahan perparkiran di suatu area property, dengan cara kerjasama dengan pemilik lahan area tersebut. Sebagian besar (*vendor*) mengelola parkir di suatu pusat perbelanjaan, perkantoran atau pelataran parkir. Perusahaan ini dibayar atas dasar jumlah transaksi yang dilakukan ataupun berdasarkan persentase pendapatan yang diperoleh yang berkisar antara 2 sampai 5%.

Pada awalnya pengelolaan parkir di pinggir jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perusahaan daerah, kemudian mulai berkembang pelataran dan gedung parkir yang juga dikelola oleh Pemerintah Daerah. Karena pengelola biasanya tidak efisien akhirnya pengelolaan mulai dikerjasamakan dengan perusahaan swasta, seperti yang banyak ditemukan saat ini diberbagai lokasi parkir umum.³⁹

Pengelolaan parkir di pasar, pasar merupakan sentra perbelanjaan yang dikunjungi oleh banyak orang menyebabkan banyak kendaraan terparkir di area umum, dimana para pengelolaan parkir harus menjaga dan mengatur perparkiran dengan sebaik mungkin sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 102.

³⁸ Pasal 3 angka 3 Perwal Kota Medan Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.

³⁹ Harmono, *Manajemen Keuangan* (Jakarta, Bumi Aksara, 2009), hal. 23.

3. Petugas Parkir

Petugas parkir adalah orang yang bertugas menjaga kendaraan yang telah dititipkan (diparkirkan) pemilik kendaraan di pelataran parkir yang telah disediakan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa parkir di tepi jalan umum Kota Medan kurang baik dan belum sesuai dengan keinginan masyarakat secara ideal. Hal ini karena letak ruang parkir yang tidak ada tempatnya yang mengganggu kapasitas jalan raya dan mengganggu kapasitas pejalan kaki. Kemudian tarif yang dipungut oleh petugas parkir yang tidak sesuai dengan tarif resmi. Kemudian SDM Dinas Perhubungan yang kurang dan banyak pelanggaran parkir oleh juru parkir.

Melihat keadaan perparkiran tepi jalan sekarang di Kota Medan mempunyai masalah yang sangat banyak diantaranya dari hasil observasi awal penulis menemukan fenomena dimana sepanjang Jalan Sutomo dan Jalan Jawa Kecamatan Medan Timur banyak petugas parkir yang tidak memberikan karcis parkir malah mereka yang memberikan karcis parkir selalu meminta kembali parkir kepada pengguna parkir setelah mengambil kendaraannya.

Pasal 43 UU LLAJ No. 22 Tahun 2009⁴⁰ j.o. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir menyatakan bahwa terdapat beberapa tempat pada ruas jalan yang tidak boleh untuk tempat berhenti atau parkir kendaraan.

⁴⁰ Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN MEDAN TIMUR

DAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Medan Timur

1. Sejarah dan Geografi Kecamatan Medan Timur

Pada Tahun 1992 sesuai dengan PP Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam wilayah Propinsi Daerah Tk. I Sumatera Utara, Kecamatan Medan Timur dimekarkan menjadi 2 (dua) yaitu Kecamatan Medan Timur dengan 11 (sebelas) kelurahan dan Kecamatan Medan Perjuangan dengan 9 (Sembilan) Kelurahan.⁴¹

Kecamatan Medan Timur merupakan salah satu kecamatan dari 21 Kecamatan di Kota Medan, yang terbentuk sesuai dengan UU Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota-kota besar, dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Medan Timur merupakan salah satu kawasan inti perkotaan dengan luas wilayah 7,82 km² yang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Medan Deli;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Medan Kota;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Medan Tembung dan Kecamatan Medan Perjuangan;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Medan Barat.

⁴¹Sumber Data Dari Kantor Kecamatan Medan Timur Tahun 2019

Dengan pusat pemerintahan yang terletak di jalan H. M. Said No. 1 Kelurahan Gaharu dengan luas areal 1.400 m². Pada Kecamatan Medan Timur terdapat kelurahan terluas dan kelurahan terkecil yaitu Kelurahan Pulo Brayen Bengkel Baru sebagai kelurahan terluas dengan luas wilayah 1,17 km² dan Kelurahan Gang Buntu sebagai kelurahan terkecil dengan luas wilayah 0,40 km². Rincian luas masing-masing kelurahan yang terdapat di Kecamatan Medan Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁴²

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kecamatan Medan Timur

No.	Kelurahan	Luas Km	Jumlah Lingkungan
1	Gang Buntu	0,40	11
2	Sidodadi	0,46	11
3	Durian	0,54	12
4	Gaharu	0,52	12
5	Glugur Darat I	0,79	13
6	Glugur Darat II	0,76	12
7	PB. Darat I	0,75	14
8	PB. Darat II	0,88	15
9	PB. Bengkel	1,06	11
10	PB.Bengkel Baru	1,17	12
11	Perintis	0,49	5
Jumlah		7,82	128

Sumber : Data Kecamatan Medan Timur Tahun 2019

2. Wilayah Administratif Kecamatan Medan Timur

Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan

Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Jumlah Kepala Keluarga, Penduduk dan Rata-rata Anggota Keluarga

No	Kelurahan	Banyaknya		Rata-Rata Anggota Rumah Tangga (Jiwa)
		Rumah Tangga	Penduduk (Jiwa)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gang Buntu	820	3.556	4,34
2	Sidodadi	1.341	5.756	4,29
3	Durian	926	3.793	4,10

⁴² Sumber Data Dari Kantor Kecamatan Medan Timur Tahun 2019

4	Gaharu	1.931	8.064	4,18
5	Glugur Darat I	1.941	8.661	4,46
6	Glugur Darat II	3.056	11.341	3,71
7	PB. Darat I	2.736	11.297	4,13
8	PB. Darat II	4.610	20.978	4,55
9	PB. Bengkel	3.219	14.001	4,35
10	PB. Bengkel Baru	2.405	10.368	4,31
11	Perintis	3.116	13.623	4,37
TOTAL		26.104	111.438	4,27

Sumber : Data Kecamatan Medan Timur Tahun 2019

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Timur yang tersebar pada 11 (sebelas) kelurahan sampai dengan tahun 2016, tercatat sebanyak 138.390 jiwa dengan jumlah penduduk laki – laki sebanyak 62.427 jiwa dan penduduk perempuan 64.278 jiwa, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kelurahan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah Kepala Keluarga (Jiwa)
		Laki – Laki	Perempuan	
1	Gang Buntu	1 706	1 849	3 556
2	Sidodadi	2 795	2 960	5 756
3	Durian	1 849	1 943	3 793
4	Gaharu	3 995	4 070	8 064
5	Glugur Darat I	4 296	4 366	8 661
6	Glugur Darat II	5 283	6 058	11 341
7	P B Darat I	5 749	5 548	11 297
8	P B Darat II	10 295	10 684	20 978
9	P B Bengkel	6 939	7 062	14 001
10	P B Bengkel Baru	5 163	5 205	10 368
11	Perintis	6 975	6 648	13 623
TOTAL		55 045	56 393	111 438

Sumber : Data Kecamatan Medan Timur Tahun 2019

Jumlah Penduduk Menurut Usia

Jumlah penduduk menurut usia untuk Kecamatan Medan Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	5.076	4.883	9.959
5-9	5.065	4.837	9.902
10-14	4.732	4.501	9.233
15-19	5.316	5.496	10.811
20-24	6.143	6.471	12.614
25-29	4.896	4.968	9.863
30-34	4.353	4.525	8.878
35-39	4.045	4.255	8.300
40-44	3.715	3.836	7.551
45-49	3.208	3.335	6.544
50-54	2.270	2.890	5.610
55-59	2.259	2.354	4.613
60-64	1.634	1.667	3.301
65-69	949	1.051	2.000
70-74	550	695	1.245
75+	385	629	1.015
Jumlah	55.045	56.393	111.438

Sumber : Data Kecamatan Medan Timur Tahun 2019

Sarana pendidikan yang tersedia di Kecamatan Medan Timur sangat lengkap mulai dari taman bermain, pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Salah satu perguruan tinggi swasta yang cukup diminati oleh masyarakat juga terdapat di Kecamatan Medan Timur lebih tepatnya berada di Kelurahan Glugur Darat II yaitu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan di Kelurahan Perintis yaitu Universitas HKBP Nomensen.

Tabel 3.5 Jenis dan Jumlah Sarana Pendidikan

No.	Jenis Sekolah	Negeri	Swasta
1	PAUD/TK	3	33
2	SD	21	18
3	SMP	2	18
4	SMA	3	14
5	PERGURUAN TINGGI	-	5
6	SEKOLAH KHUSUS	-	1
Jumlah		29	89

Sumber : Data Kecamatan Medan Timur Tahun 2019

Dalam meningkatkan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa di Kecamatan Medan Timur juga terdapat sarana dan prasarana ibadah yang secara terperinci digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Jenis dan Jumlah Sarana Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	55
2	Mushollah	28
3	Gereja	32
4	Vihara	9
5	Pura	5
Jumlah		129

Sumber : Data Kecamatan Medan Timur Tahun 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penduduk Kecamatan Medan Timur merupakan penduduk yang heteroggen namun kerukunan hidup antar umat beragama dan sikap saling hormat-menghormati antar pemeluk agama sangat terjaga dan tidak pernah terjadi perselisihan yang berarti antar umat beragama.

Dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dan terwujudnya masyarakat yang sehat di Kecamatan Medan Timur terdapat sarana dan prasarana kesehatan yang cukup banyak baik yang dikelola oleh swasta maupun negara. Sarana dan prasana kesehatan dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7 Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan

NO	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	7
2.	Klinik	20
3.	Puskesmas / Pustu	2
4.	Posyandu Balita	78
5.	Posyandu Balita	10
6.	Apotik	32
7.	Laboratorium	4
8.	Praktek Dokter Umum	76
9.	Praktek Dokter Gigi	32
Jumlah		260

Sumber : Data Kecamatan Medan Timur Tahun 2019

Pada tabel 3.7 Kecamatan Medan Timur mempunyai sarana kesehatan yang beragam seperti Rumah Sakit Pemerintah yaitu Rumah Sakit Pirngadi yang berada di Kelurahan Perintis, Rumah Sakit Swasta Murni Teguh yang berada di Kelurahan Gang Buntu. Selain dari itu Kecamatan Medan Timur juga mempunyai Rumah Sakit Jiwa yang berada di Jl.Mahoni Kelurahan Gaharu.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota medan

1. Sejarah Terbentuknya Dinas Perhubungan di Indonesia

Departemen Perhubungan telah ada sejak periode awal kemerdekaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode Kabinet-Kabinet Republik Indonesia. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Medan disusun berawal dari pemikiran strategis tentang nilai-nilai luhur yang dianut /dimiliki oleh seluruh pimpinan dan staf Dinas Perhubungan Kota Medan yang merupakan karakteristik inti dari tugas pokok yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.⁴³

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Pemerintah Daerah bermaksud melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan hubungan daerah. Pemerintah Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perhubungan yang efektif, efisien, profesional, handal dan berkemampuan.

2. Tujuan dan Struktur Dinas Perhubungan Kota Medan

Adapun tujuan dari Dinas Perhubungan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan yang baik di bidang perhubungan yang semakin maju agar dapat terus

⁴³ Sumber Arsip Umum Dinas Perhubungan Kota Medan.

memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemajuan Ilmu dan Teknologi yang berlaku.⁴⁴

Struktur organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggungjawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui struktur organisasi. Untuk melihat struktur organisasi dinas perhubungan kota medan dapat di lihat pada halaman 10.

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kota.⁴⁵

3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 63 Tahun 2017, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan.
2. Dinas merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

3. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas,Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administratif Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Struktur Organisasi

1. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan
 3. Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik
2. Kepala Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas
 2. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas
 3. Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Kepala Bidang Angkutan Jalan, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek

2. Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Tyarek dan Angkutan Barang
3. Kepala Seksi Terminal
4. Kepala Bidang Pelayaran, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Kepelabuhanan
 2. Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran
 3. Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
5. Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan :
 1. Kepala Seksi Perkeretaapian
 2. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan
 3. Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*

Peta Lokasi Kecamatan Medan Timur



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Pengelolaan Pelataran Parkir

1. Izin Pengelolaan Parkir

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tiga hal penting, yakni tentang izin, pengelolaan dan parkir. Kemudian menjelaskan keterkaitan ketiganya dalam skripsi ini.

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁴⁷ Dalam pengertian yang luas, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Sedangkan dalam pengertian sempit, izin adalah pengikatan aktifitas-aktifitas pada suatu peraturan, izin pada umumnya berdasarkan pada keinginan pembuat undang-undang mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk, tercela, tidak diinginkan pemerintah dengan diharapkan pemerintah dapat melakukan pengawasan.

Pengertian izin atau *vergunning*, menurut Sutedi, adalah bilamana pembuat peraturan tidak secara umum melarang suatu perbuatan, tetapi juga memperkenankannya asal saja diadakan sesuai yang ditentukan untuk masing-

⁴⁷ Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 188.

masing hal secara konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. Lebih lanjut Sutedi mengemukakan bahwa izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu, yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Wawancara penulis dengan Bapak Indra Siregar di kantor Dinas Perhubungan Kota Medan tentang izin pengelolaan parkir di Kota Medan dia mengatakan bahwa:

Berdasarkan kepada peraturan yang telah di buat dan kebiasaan yang telah berlaku di Dishub kota Medan, jika ada orang yang hendak melakukan permohonan izin lokasi untuk pengelolaan tempat parkir umum, maka dari itulah ada beberapa hal persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya adalah tidak adanya pelanggaran lalu lintas dan tidak sampai mengganggu kepentingan umum.⁴⁹

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu.⁵⁰ Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu sebagai berikut : a). Instrumen yuridis, lazimnya negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*just on orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum; b). Peraturan perundang-undangan, salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *weimaticheidvan* atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan; c).

⁴⁸ Adrian Sutedi, *Peraturan Izin*, (Bandung, Pustaka Ilmu, 2010), hal. 167.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Indra Siregar, tanggal 12 Maret 2020 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan.

⁵⁰ Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 195.

Organ pemerintah, adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik tingkah pusat maupun daerah.⁵¹

Wawancara penulis dengan Bapak Indra Siregar di kantor Dinas Perhubungan Kota Medan tentang parkir liar atau permasalahan tentang parkir dia mengatakan bahwa:

Jika ada masalah tentang parkir, baik parkir liar atau juru parkir tidak bekerja secara baik kepada masyarakat, maka akan di laporkan. Jika juru parkir masih melakukan kesalahan dalam pekerjaannya pihak Dishub akan menindak tegas kepada yang melakukan kesalahan. Untuk menegakkan peraturan pihak Dishub juga bekerja sama dengan dinas lainnya seperti, Satpol PP dan Polres untuk sosialisasi dalam penegakan Perda dan peraturan bekerja.⁵²

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/pemda untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai acuan. Tanpa rasionalitas dan desain instrumen untuk membela kepentingan atas tindakan yang berdasarkan kepentingan individu.⁵³

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha

⁵¹ *Ibid*, hal. 213.

⁵² Wawancara dengan Bapak Indra Siregar, tanggal 12 Maret 2020 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan.

⁵³ Cecep Triwibowo, *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit (Sebuah Kajian Hukum Kesehatan)*, (Yogyakarta, Nuha Medika, 2012), hal 1.

yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.⁵⁴

Adapun pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.⁵⁵ Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja “*to manage*” yang berarti menangani, memimpin, membimbing atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu kegiatan.⁵⁶

Menurut James A.F. Stoner dan R. Edward Freeman pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha

⁵⁴ Adrian Sutedi, *Peraturan Izin*, (Bandung, Pustaka Ilmu, 2010), hal. 169.

⁵⁵ Nugroho, *Good Governance*, (Bandung, Mandar Maju, 2003), hal. 119.

⁵⁶ Ajeng Retno Widyastuti, dkk, April 2018, *Studi Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 3, [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/Ajeng%20Retno%20W%20\(07-30-18-03-19-03\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/Ajeng%20Retno%20W%20(07-30-18-03-19-03).pdf), (diakses pada tanggal 12 September 2020, pukul 14.21).

yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵⁷ Dalam pandangan Balderton dalam Adisasmita istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.⁵⁸

Pengelolaan dalam administrasi merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses pencapaian tujuan.⁵⁹ Sehingga menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengawasan, penggerakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan, parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak, yakni suatu kendaraan yang bersifat sementara.⁶⁰ Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu

⁵⁷ Stoner James A.F dan Freeman R. Edwar, *Manajemen Edisi Keempat*, (Jakarta, Intermedia, 1992), hal. 3.

⁵⁸ Adisasmita, Raharjo. *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu, 2011), hal. 21.

⁵⁹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), hal. 89.

⁶⁰ David, M.L. Tobing, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Timpani Agung, 2007), hal. 1.

waktu tertentu di suatu tempat yang telah disediakan. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang dapat bergerak di atas jalan dan digerakkan oleh peralatan teknik yang berada di kendaraan tersebut, sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang dapat bergerak di atas jalan dan tidak digerakkan peralatan teknik pada kendaraan itu tetapi dapat digerakkan oleh tenaga penghela.⁶¹

Tempat parkir adalah lokasi parkir di luar badan jalan yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha manapun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.⁶² Para pengguna tempat parkir ini akan membayar biaya parkir yang disebut dengan retribusi parkir. Retribusi parkir adalah pungutan yang diambil oleh negara baik oleh pemerintah pusat atau daerah sehubungan dengan pengguna fasilitas negara. Dapat juga dikatakan pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan sesuatu prestasi tertentu dari pemerintah.⁶³

Parkir ditepi jalan umum adalah kegiatan parkir yang dilakukan ditepi jalan yang tidak melarang kendaraan untuk berhenti. Jika berdasarkan definisi-definisi parkir yang dimaksud tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa parkir ditepi jalan umum adalah menempatkan kendaraan tersebut pada badan jalan atau

⁶¹ Jufrizen, Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pakir Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan Kota Medan, Artikel Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2011, hal. 11, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/view/104>, (diakses pada tanggal 21 September 2020, pukul 11.18).

⁶² Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Bab I Pasal I angka 16, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=422>, (diakses pada tanggal 21 September 2020, pukul 12.02).

⁶³ R. Santoso Brotodiharjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung, Refika Aditama, 2010), hal. 7.

bahu jalan untuk berhenti dan ditinggalkan sementara oleh pemiliknya. Parkir ditepi jalan umum biasanya dilakukan secara paralel atau parkir serong, serta dinyatakan dengan rambu dan marka.⁶⁴

Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan dengan rambu-rambu larangan, rambu-rambu petunjuk serta informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan. Pengelolaan perparkiran terhadap gedung parkir atau pelataran parkir atau tempat-tempat penyimpanan kendaraan yang bukan sepenuhnya milik pemerintah kota ditetapkan dengan cara sewa berdasarkan surat perjanjian dengan Kepala Daerah.

Dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Medan belum secara optimal karena lahan parkir belum terkelola dengan baik dan dalam mengurangi kemacetan juga masih belum secara optimal karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan dari Dinas Perhubungan Kota Medan khususnya Seksi Perparkiran. Pada mulanya pengelolaan parkir di pinggir jalan dilakukan oleh pemerintah Daerah melalui perusahaan daerah. Kemudian mulai berkembang peralatan dan gedung parkir yang juga dikelola oleh pemerintah daerah.

Pada setiap lokasi parkir ditepi jalan umum dipasang tanda-tanda atau rambu-rambu parkir yang memuat penjelasan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Pasal 9 yaitu, a) tempat parkir dan waktu paker, b)

⁶⁴ Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Grasindo Cikal Sakti, 2007), hal. 48.

besarnya retribusi parkir yang dikenakan, c) jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir, d) cara atau sistem parkir, e) marka parkir.

Pengelolaan perparkiran daerah dilakukan oleh pengelola perparkiran pada tempat parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Dan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pelataran parkir.⁶⁵

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2002 terdapat tiga jenis bentuk pelayanan perparkiran di Kota Medan, yaitu: a). Pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah Daerah.; b). Tempat khusus parkir yaitu penyediaan pelayanan parkir khusus yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta; c). Perizinan pelataran parkir yaitu pemberian izin kepada orang pribadi yang disediakan oleh pihak ketiga dengan memungut bayaran.

Pada dasarnya kebijakan pengelolaan perparkiran dalam rangka pengendalian parkir memiliki dua fungsi yakni sebagai pengontrol aktivitas pergerakan dan lalu lintas, serta pertumbuhan ekonomi suatu kawasan. Hal ini disebabkan perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu lintas dan juru parkir sangat berguna untuk mengatur kendaraan yang sedang terparkir di lahan parkir, juga menjaga kendaraan agar tetap aman dan tidak adanya barang yang hilang, jika pemilik kendaraan kehilangan kendaraannya maka petugas parkir diminta pertanggung jawabannya.

⁶⁵ Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir, Pasal 4, hal. 4.

2. Landasan Hukum Izin Pengelolaan Pelataran Parkir

Pengelolaan perizinan pelataran parkir termuat dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 bab III pasal 4 tentang izin pelayanan parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir dan perizinan pelataran parkir, sebagaimana yang termuat dalam: pasal 2, penetapan tempat-tempat parkir yang dikenakan retribusi diatur dan ditetapkan oleh keputusan kepala daerah; pasal 3, untuk pengelolaan tempat parkir serta pembinaan dan pengawasan perparkiran lainnya dilaksanakan oleh instansi yang ditunjukan yang merupakan aparat pelaksana pemerintah kota; pasal 4, pengelolaan perparkiran daerah dilakukan oleh pengelola perparkiran pada tempat parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pelataran parkir. Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pelataran parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b harus mendapat izin dari Kepala Daerah dan di daftar ulang setiap tahunnya.⁶⁶

Wawancara penulis dengan Bapak Indra Siregar di kantor Dinas Perhubungan Kota Medan tentang landasan hukum pengelolaan parkir dia mengatakan bahwa:

Aturan yang digunakan dalam mengelola parkir itu diatur dalam Peraturan daerah nomor 7 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan perizinan pelataran parkir sedangkan, aturan untuk pajak parkir itu diatur dalam Peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Medan nomor 10 tahun 2011 tentang pajak parkir.⁶⁷

⁶⁶ Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Bab III Pengelolaan dan Perizinan pasal 4,5 dan 6, dikutip dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2002/medan7-2002.pdf> , (diakses pada tanggal 14 September 2020, pukul 20.15).

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Indra Siregar, tanggal 12 Maret 2020 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan.

Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan atau yang biasa disebut UPT Perparkiran adalah suatu unit yang mengelola urusan parkir yang ada diseluruh titik Kota Medan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan adalah unit pelaksana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan.

Wawancara penulis dengan Bapak Bagus selaku juru parkir di Jalan Sutomo tentang pembekalan atau sosialisasi dari Dishub dia mengatakan bahwa:

Dishub kota Medan melakukan sosialisasi biasanya akhir tahun, jika ada pembaruan SK mereka melakukan sosialisasi setiap setahun sekali. Sosialisasi ini kadang ada dari kepolisian pemerintah kota dan dari Dishub sendiri. Sosialisasi dari BPJS juga masalah ketenaga kerjaan.⁶⁸

Peraturan Daerah tersebut secara umum memuat prinsip dalam penetapan perizinan pelataran parkir yaitu penetapan tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Namun, dalam penerapan segala kebijakan tentang retribusi parkir masih memiliki banyak kendala. Dimana masih banyak terdapat juru parkir yang kurang

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Bagus, tanggal 15 Maret 2020 di perparkiran Jalan Sutomo Kecamatan Medan Timur.

mengetahui akan isi kebijakan retribusi parkir, kurangnya kesadaran para pengguna parkir untuk membayar retribusi dan masalah lainnya.

3. Instansi yang Berwenang Mengeluarkan Izin Pelataran Parkir

Secara langsung pada bagian ini dapat dikatakan pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah pemerintah. Hanya saja dalam hal yang demikian harus dapat dilihat izin bagaimanakah yang dimohonkan oleh masyarakat, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin tersebut.

Dinas Perhubungan yang mengeluarkan pengelolaan parkir ditepi jalan sesuai dengan Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Izin Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Peizinan Pelataran Parkir.

Sebagai gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Medan sebelum tahun 2002 semula bernama Cabang Dinas Lalu Lintas Angkatan Jalan Raya (LLAJR) yang berada di bawah induk Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Tingkat I Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diubah namanya menjadi Dinas Lalu Lintas Angkatan Jalan Raya (LLAJR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2002 tentang penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat tentang Lalu Lintas Angkatan Jalan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang sampai sekarang dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota Medan.

Pengelolaan Perparkiran di Kota Medan ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran di bawah Dinas Perhubungan yang merupakan salah satu instansi pelayanan publik yang memiliki potensi cukup strategis, dimana

UPT Perparkiran melaksanakan 3 (tiga) fungsi sekaligus yaitu, 1) pendukung sistem transportasi/*traffic management*, 2) sebagai pelayanan umum/*public service*, 3) sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dinas Perhubungan Kota Medan beralamatkan di Jalan Pinang Baris, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Dinas Perhubungan adalah pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Medan dipimpin oleh Bapak Iswar Lubis, selaku kepala Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Wawancara penulis dengan Bapak Bagas selaku petugas parkir di Jalan Sutomo tentang pengawasan parkir dari Dishub kota Medan dia mengatakan bahwa:

Pihak Dishub hanya sesekali datang ke lapangan untuk mengecek keadaan perparkiran, karena pernah kejadian perebutan lahan parkir di area Jalan Sutomo tersebut. Akan tetapi, pihak Dishub datang untuk mengambil setoran tiap harinya. Untuk masalah karcis parkir, petugas juru parkir memberikan karcis parkir kepada pengguna lahan parkir jika diminta saja.⁶⁹

Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki beberapa tugas utama, salah satu tugasnya adalah mengenai pengelolaan izin pelataran parkir. Pengelolaan lahan parkir diserahkan kepada masyarakat di Kota Medan. Pengelola lahan parkir dibebani kewajiban untuk menyerahkan sebagian hasil retribusi yang didapatkan secara harian kepada Dinas Perhubungan Kota Medan, kemudian Dinas Perhubungan Kota Medan menyerahkan sebagian hasil dari pendapatan perhari

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Bagas, tanggal 15 Maret 2020 di perparkiran Jalan Sutomo Kecamatan Medan Timur.

dari pengelola lahan parkir tersebut kepada Sekretaris Daerah Kota Medan untuk kemudian dimasukkan ke dalam kas daerah.

Ketentuan mengenai jumlah yang harus diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kota Medan adalah tergantung dari beberapa hal, diantaranya dengan melihat seberapa besar lahan yang dikelola, berapa banyak pengunjung yang mendatangi lahan yang dikelola tersebut. Perkiraan awal yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dapat berubah apabila dengan berjalannya proses pengelolaan tersebut dinilai dapat menghasilkan lebih dari perkiraan awal.

Wawancara penulis dengan Bapak Indra Siregar di kantor Dinas Perhubungan Kota Medan tentang instansi yang berwenang mengeluarkan izin parkir dia mengatakan bahwa:

Yang berwenang mengeluarkan izin untuk perparkiran itu ialah Dinas Perhubungan di kota tersebut, karena hanya Dishublah yang mengatur soal keadaan parkir di kota Medan ini. Dimana izin pelataran parkir mengikuti perda yang sudah di terbitkan. Sedangkan izin untuk menjadi juru parkir itu hanya membuat surat lamaran, pas foto, ijazah, SKCK dan lokasi mana yang mau di tempati dan nanti akan di keluarkannya surat izin juru parkir buat melegalkan mereka.⁷⁰

Ketentuan tersebut dilaksanakan untuk meminimalisir kecurangan yang dapat dilakukan oleh pengelola lahan parkir. Pada awalnya, penyerahan sebagian pengehasilan dari pengelolaan lahan parkir ditentukan dari seberapa banyak karcis yang dikeluarkan oleh pengelola lahan parkir perharinya dengan persentase, tetapi hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kecurangan yang dilakukan oleh pengelola lahan parkir.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Indra Siregar, tanggal 12 Maret 2020 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan.

Wawancara penulis dengan Bapak Indra Siregar di kantor Dinas Perhubungan Kota Medan tentang pengawasan langsung dari pihak Dishub kepada juru parkir di Kota Medan dia mengatakan bahwa:

Pengawasan langsung dari Dishub jarang dilakukan, akan tetapi jika ada aduan dari masyarakat pihak Dishub langsung turun ke lapangan. Masyarakat mengadu biasanya ke *facebook* atau website resmi. Sedangkan masalah karcis parkir, sering kali juru parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir padahal memberikan karcis parkir sudah diberlakukan di SK mereka, tapi tidak juga dilaksanakan.⁷¹

Kecurangan tersebut dilakukan dengan cara memberikan karcis berulang-ulang kepada pengguna jasa parkir, sehingga setoran yang diberikan tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh oleh pengelola lahan parkir. Pengelola lahan parkir dalam mengelola suatu lahan parkir di Kota Medan mempunyai pemegang izin. Adanya sertifikat pengelolaan lahan parkir atau pemegang izin menyebabkan adanya hak dan kewajiban baru terhadap pemegangnya, pemegang tersebut memiliki hak untuk menguasai suatu lahan parkir tertentu di Kota Medan sehingga sebagian besar pemegang sertifikat tersebut menyalah artikan fungsi sertifikat pengelolaan lahan parkir.

Sebagian besar pemegang sertifikat tersebut belum memahami status hukum yang dimiliki, pada dasarnya status hukum yang dimiliki oleh pemegang izin adalah sebagai pengelolaan lahan bukan sebagai pemilik lahan. Penyalahartikan tersebut menyebabkan pengelola melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak diketahui oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Indra Siregar, tanggal 12 Maret 2020 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan.

B. Aturan Retribusi Pengelolaan Parkir

1. Retribusi, Retribusi Daerah dan Objek Retribusi

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.⁷² Retribusi merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari apabila tidak mengkonsumsi layanan tanpa memperhatikan apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang publik. Retribusi parkir adalah kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi.⁷³

Menurut Munawir (1997), Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditujukan. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi/pelayanan yang diberikan pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya, didasarkan atas peraturan yang berlaku.⁷⁴

⁷² Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 5.

⁷³ Semdi Willy Tri Hardianto, *Jurnal Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir*, Vol. 1, No.2, 2012, hal. 22, <https://www.neliti.com/id/publications/42388/implementasi-kebijakan-retribusi-parkir-terhadap-pad>, (diakses pada tanggal 22 Oktober 2020, pukul 13.31).

⁷⁴ Damas Dwi Anggoro, *Pajak daerah dan retribusi daerah*, (Malang, Ub Press, 2017), hal. 19.

Wawancara penulis dengan Bapak Indra Siregar di kantor Dinas Perhubungan Kota Medan tentang proses setoran uang parkir di Kota Medan dia mengatakan bahwa:

Pihak Dishub kota Medan sendiri turun ke lapangan meminta petugas parkir yang telah diutus untuk menyetorkan uang parkir yang di dapat hari itu dengan waktu di sore hari. Mereka keliling apapun cuacanya dari tempat pertama sampai tempat terakhir. Jika uang parkir yang di setorkan kurang, maka petugas dari Dishub wajib menutupi kekurangan tersebut.⁷⁵

Pemungutan retribusi di dalam Pasal 28 retribusi di pungut dengan menggunakan dokumen berupa karcis atau kupon, dokumen berupa karcis atau kupon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. Hasil pungutan retribusi yang diperoleh juru parkir di setor kepada komandan regu (danru) komandan regu yang selanjutnya di setor ke kas umum daerah melalui bendahara penerima dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Tanpa kesadaran masyarakat pelaksanaan pemungutan retribusi akan mengalami kesulitan. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Medan masih terlihat banyak menggunakan parkir yang membayar tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, selain itu juga masih banyak masyarakat yang memarkir kendaraannya sembarang tempat.

Tata cara pemungutan dan penetapan retribusi yaitu, Kepala Daerah menerbitkan SKRD untuk penetapan Retribusi yang didasarkan kepada Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD). Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Indra Siregar, tanggal 12 Maret 2020 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan.

wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Kepala Daerah menerbitkan SKRD secara jabatan.⁷⁶

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan. Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 22 dan 23 dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dan atau bentuk kupon atau karcis. Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).⁷⁷

Penggolongan retribusi berbeda dengan penggolongan pajak dikarenakan pada retribusi terdapat imbalan langsung pada pihak-pihak yang menggunakan objek retribusi yang telah ditentukan. Retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: 1) Jasa umum; 2) Jasa usaha; 3) Perizinan tertentu.

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Sedangkan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.⁷⁸

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 161 menetapkan bahwa pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk

⁷⁶ *Ibid*, Bab XIV, Pasal 27.

⁷⁷ *Ibid*, Pasal 28.

⁷⁸ Tmbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2013), hal. 34.

mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.⁷⁹

Struktur besarnya tarif retribusi menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 untuk setiap kendaraan ditepi jalan umum. Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua), untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 300, dan untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 200. Lalu, untuk kendaraan roda 4 (empat), untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 1.000, untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 500. Sedangkan, parkir yang bersifat insidental (temporer) ditempat-tempat cara hiburan, kendaraan bermotor roda dua dan empat dikenakan tarif sebesar Rp. 1.000, sedangkan roda dua sebesar Rp. 500.⁸⁰

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat pengguna jasa.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung yang diterima masyarakat pengguna jasa dimaksud.

⁷⁹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm>, (diakses pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 18.21).

⁸⁰ *Ibid*, Bab XIII Struktur Besarnya Tarif Retribusi, Pasal 24.

Wawancara penulis dengan Bapak Indra Siregar di kantor Dinas Perhubungan Kota Medan tentang penentuan retribusi di Kota Medan dia mengatakan bahwa:

Untuk penentuan retribusi itu perlokasi, maksudnya adalah jika ada keramaian di satu titik pasti ada tempat parkir, yang kita perhitungkan itu orang yang menggunakan tempat parkir bukan rame pengunjung. Kalau di timbang dari hasil brutonya kasihan juru parkirnya, karena tarif setoran tiap tahunnya pasti bertambah, maka dari itu banyaknya pengunjung tapi tidak menggunakan fasilitas parkir ya sama saja pendapatan mereka berkurang.⁸¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Pasal 26 pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat sensitif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan juga pembangunan daerah, untuk meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Indra Siregar, tanggal 12 Maret 2020 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan.

Sebagaimana ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini, penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi daerah. Sebagaimana penjelasan diatas bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi, apabila seseorang ingin menikmati pelayanan yang telah disediakan pemerintah, ia harus membayar retribusi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang telah berlaku.

Dengan demikian, jumlah uang yang disetorkan oleh pengelola parkir tersebut tidak mencerminkan realisasi pendapatan parkir yang sesungguhnya, karena jika pendapatan parkir melebihi nilai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya penyetoran tetap sejumlah kesepakatan awal dan selisihnya tidak disetorkan ke kas daerah.

Sedangkan menurut UU 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut: *Pertama*, retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenan. *Kedua*, hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. *Ketiga*, pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

Keempat, retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. *Kelima*, sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.⁸²

Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dapat dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.⁸³

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut, pertama tarif retribusi jasa umum, tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya

⁸² Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Jakarta, Sumber Ilmu, 2004), hal. 6.

⁸³ Tmbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2013), hal. 40.

penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, kedua tarif retribusi jasa usaha, tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta, ketiga tarif retribusi perizinan tertentu, tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penata usahaan dan biaya dampak negatif dari perizinan tersebut.

Adapun perbedaan pajak daerah dengan retribusi daerah adalah, sebagai berikut, *pertama* pajak berasal dari dasar hukum Peraturan Perundang-undangan sedangkan retribusi berasal dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau pejabat negara yang lebih rendah, *kedua* balas jasa pada pajak bersifat tidak langsung, sedangkan pada retribusi bersifat langsung dan nyata kepada individu tersebut, *ketiga* pungutan pajak berlaku untuk umum seperti, penghasilan kekayaan, laba perusahaan dan kendaraan, sedangkan pungutan retribusi hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah, *keempat* pajak bersifat dapat dipaksakan (menurut undang-undang). Jadi, wajib dibayar jika tidak, maka akan mendapat sanksi, sedangkan retribusi dapat dipaksakan juga akan tetapi paksaannya bersifat ekonomis yang hanya berlaku pada orang-orang yang menggunakan jasa pemerintah, *kelima* lembaga pungutan pajak adalah pemerintah pusat maupun daerah (negara), sedangkan lembaga

pungutan retribusi hanya pemerintah daerah, *keenam* pajak bertujuan untuk kesejahteraan umum, sedangkan retribusi bertujuan untuk kesejahteraan individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah.⁸⁴

Daerah provinsi, kabupaten dan kota diberi peluang dalam meningkatkan potensi sumber keuangan melalui penetapan jenis retribusi selain dari yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat.⁸⁵

Wawancara penulis dengan Bapak Rio selaku petugas parkir di Jalan Sutomo tentang permasalahan kehilangan kendaraan di Kota Medan dia mengatakan bahwa:

Pernah mengalami kehilangan sepeda motor dan si pemilik kendaraan parkir di atas trotoar, kemudian tertutup oleh mobil jadi tidak kelihatan sepeda motor tersebut. Menurut dia, jika parkir kendaraan di tepi jalan itu kehilangan barang apapun di tanggung pemilik. Tapi, kalau ada kehilangan seperti itu petugas parkir diminta menjadi saksi di kepolisian dan juga pihak Dishub ikut dalam menyelesaikan masalah ini.⁸⁶

Objek retribusi parkir berupa penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan seperti disebutkan dalam Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Klarifikasi tempat parkir yang dikenakan pajak parkir antara gedung parkir dan pelataran parkir.

Dalam pasal 17 dijelaskan bahwa objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa tempat parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir dan perizinan pelataran parkir untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun

⁸⁴ M. Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta, Rajawali Press, 2010), hal. 54.

⁸⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Jakarta, Sumber Ilmu, 2004), hal. 63.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Rio, tanggal 15 Maret 2020 di Perparkiran Jalan Sutomo Kecamatan Medan Timur.

pada pasal 18 diterangkan bahwa subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa berupa tempat parkir di tepi jalan umum tempat khusus parkir dan perizinan pelataran parkir. Sedangkan pasal 19 wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini, diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.

2. Retribusi Pelayanan Parkir

Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh kepala daerah. Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di rancang dengan menggunakan alat kendali berupa karcis parkir. Setiap pengguna parkir di tepi jalan umum retribusi sesuai tarif yang ditetapkan dan diberikan karcis sebagai bukti bayar. Pada waktu yang telah ditentukan, pengelolaan parkir akan menyetorkan pendapatan parkir kepada bendaha penerimaan yang terkait beserta bonggol sisa parkir. Bonggol sisa karcis digunakan sebagai alat untuk ngontrol pendapatan yang seharusnya diterima, karena dapat menunjukkan berapa jumlah karcis yang terjual dan jumlah uang yang seharusnya diterima.⁸⁷

Retribusi parkir di tepi jalan umum sering kali tidak dipungut berdasarkan jumlah karcis yang terjual, namun berdasarkan kesepakatan antara Pemda dengan pengelola parkir. Dalam hal ini, biasanya Pemda membuat kesepakatan dengan pengelola parkir, dimana pengelola parkir diberikan kewenangan untuk mengelola parkir disuatu wilayah dan pengelola parkir wajib menyetorkan uang dengan jumlah tertentu ke kas daerah sebagai pendapatan retribusi.

⁸⁷ Moermahadi, *Laporan keuangan pemerintah daerah*, (Bogor, Kesatuan Press, 2017), hal. 213.

Retiribusi pelayanan parkir di kota Medan ada beberapa hal yang terjadi dalam pelayanan retribusi parkir di kota Medan, seperti penarikan tarif parkir oleh juru parkir untuk sepeda motor di depan RS. Murni Teguh yang menjadi Rp. 3.000 sedangkan di jalan Sutomo Rp. 2.000 dan hal ini tidak sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2002 dan itu sudah jelas melanggar aturan yang sudah ditentukan di dalam Peraturan daerah tersebut. Agar turut serta juru parkir melakukan pemungutan tarif parkir yang sudah ditentukan di dalam Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2002.

Aturan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir dan retribusi perizinan pelataran parkir dipungut oleh daerah.⁸⁸ Adapun cara pengukuran tingkat penggunaan jasa retribusi adalah, 1) Lamanya parkir pada lokasi-lokasi khusus yang ditetapkan kemudian; 2)Jenis kendaraan bermotor; 3) Frekwensi; 4)Biaya operasional⁸⁹

Wawancara penulis dengan Bapak Indra Siregar di kantor Dinas Perhubungan Kota Medan tentang pengutipan retribusi parkir di Kota Medan dia mengatakan bahwa:

Pelaksanaan Retribusi Parkir di Kota Medan sudah cukup melaksanakan tugasnya untuk memungut tarif parkir yang berkawasan di jalan jawa yang bertepatan di samping rumah sakit Murni Teguh petugas parkir meminta uang kepada konsumen sebesar Rp. 3.000, padahal sudah jelas sekali di dalam Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2002, yang dialami dalam penerapannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan itu, kurangnya dukungan pemerintah dan tidak adanya

⁸⁸ Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002, Bab X (Wilayah Pemungutan), <https://www.google.com/search?q=perda+kota+medan+mokor+7+tahun+2002&oq=perda+kota+medan+mokor+7+tahun+2002&aqs=chrome..69i57j0i333l2.6125j0j4&client=ms-android-samsung-ga-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8>, (diakses pada tanggal 20 September 2020, pukul 00.12).

⁸⁹ *Ibid*, Pasal 22.

pengawasan oleh penegak hukum, sehingga peraturan ini tidak berjalan secara yang diinginkan.”⁹⁰

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu penyumbang retribusi daerah pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya. Kegiatan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh petugas parkir di kawasan jalan Sutomo dan depan rumah sakit Murni Teguh masih belum optimal mengenai tata cara pemungutan, perlunya kesadaran dan pemahaman dari petugas parkir sehingga tidak adanya penyelewengan dana atas pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Wawancara penulis dengan Bapak Ari selaku juru parkir tidak resmi yang tidak memiliki tanda pengenal apapun di perparkiran depan Rumah Sakit Murni Teguh tentang retribusi pelayanan parkir dia mengatakan bahwa:

Kalau untuk setoran ke Dishub kami tidak memberikannya, malah uang parkir dari konsumen kami masukkan ke kantong tidak ada sistem setor menyeter ke Dishub. Kalau di sini sistemnya pakai shif, kita kerja gantian. Ada yang dari pagi sampai siang, ada yang dari siang sampai malam. Beda lagi sama tukang parkir resmi dari Dishubnya. Kalau orang itu kerjanya dari pagi sampai sore aja, terus uangnya di setorkan sama Dishub, kalau kami tidak.⁹¹

Wawancara penulis dengan bapak Sugiono selaku juru parkir resmi yang telah memiliki tanda pengenal dari Dinas Perhubungan Kota Medan di perparkiran depan Rumah Sakit Murni Teguh tentang retribusi pelayanan parkir dia mengatakan bahwa:

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Indra Siregar, 12 Maret 2020, di kantor Dinas Perhubungan Kota Medan.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Ari, tanggal 14 Maret 2020 di perparkiran depan Rumah Sakit Murni Teguh.

Setiap melakukan storan ke Dinas Perhubungan kota Medan mereka tidak pernah di minta untuk memberikan sisa karcis parkir dan juga tidak memberikan karcis parkir ke konsumen, jika diminta konsumen karcis parkir maka diberikan, jika tidak maka tidak diberikan. Sedangkan di Pasal 10 dan Pasal 28 sudah jelas dikatakan bahwa pemilik atau pengemudi kendaraan yang menempatkan kendaraannya di suatu tempat parkir baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir wajib menyimpan karcis yang diberikan petugas selama kendaraan tersebut masih di parkirkan.⁹²

Pada dasarnya kebijakan pengelolaan perparkiran dalam rangka pengendalian parkir memiliki dua fungsi sebagai pengontrol aktivitas pergerakan dan lalu lintas, serta pertumbuhan ekonomi suatu kawasan. Hal ini di sebabkan perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu lintas.

Adapun kewajiban dan ketentuan larangan di dalam Perda Kota Medan No. 7 Tahun 2002 terdapat di Bab V Pasal 10 yaitu, 1) Pemilik pengemudi kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di suatu tempat parkir baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir, wajib mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang dimuat pada rambu parkir dan marka jalan; 2) Pemilik atau pengemudi kendaraan yang menempatkan kendaraannya di suatu tempat parkir baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir wajib menyimpan karcis yang diberikan petugas selama kendaraan tersebut masih diparkirkan dan pemilik atau pengemudi wajib memelihara ketertiban dan kebersihan tempat parkir

Dalam pasal 11 menjelaskan tentang, memarkirkan kendaraan di luar batas suatu petak parkir, dilarang memarkirkan kendaraan yang tidak sesuai dengan rambu parkir dan marka jalan, dilarang melakukan kegiatan lainnya parkir kendaraan di tempat parkir tanpa izin kepala daerah. Sedangkan, pada pasal 12

⁹² Wawancara dengan Bapak Sugiono, 14 Maret 2020 di perparkiran depan Rumah Sakit Murni Teguh.

menjelaskan tentang yaitu, dilarang menyelenggarakan pelataran parkir tanpa seizin kepala daerah, dilarang memungut pembayaran parkir di pelataran parkir diluar tarif yang ditetapkan dalam izin.

Sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Kota Medan No. 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang dimuat di dalamnya yaitu nama, objek, subjek dan wajib retribusi. Bab VIII pasal 16 “dengan nama retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi tempat khusus parkir dan retribusi perizinan, kelataran parkir dipungut retribusi.

C. Tinjauan Fiqh Siyasah

Penulis membuat karya ilmiah ini untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah yang terdapat pada peraturan daerah. Kajian ini penting sekali dilakukan karena peraturan daerah yang dibuat tanpa memperhatikan nilai-nilai yang terkandung pada fiqh siyasah akan kering dan kehilangan spirit keislamannya. Hukum yang terlahirpun bisa saja malah tidak membuat ketidakadilan dan kemakmuran jika nanti diterapkan di masyarakat. Sehingga perlu adanya formasi yang jitu dalam memadukan unsur fiqh siyasah dan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah setempat.

Adapun prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh tersebut semacam ilmu pengetahuan. Namun, sebenarnya fiqh tidak sama dengan ilmu di karenakan fiqh bersifat zanni yang berarti fiqh merupakan hasil yang dicapai melalui ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Di dalam bahasa arab, fiqh ditulis dengan fiqh berarti paham atau pengertian.

Sedangkan ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits. Dengan kata lain, ilmu fiqh adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya dan berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu di susun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut hukum fiqh.⁹³

Dengan menganalisa pengertian di atas dapat di rumuskan hakikat dari fiqh yaitu, 1) Fiqh itu adalah Ilmu tentang hukum Allah; 2) Yang di bicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah; 3) Pengertian tentang hukum Allah itu di dasarkan kepada dalil tafsir; 4) Fiqh digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang mujahid atau faqih.

Ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal sebagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Adapaun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut, pertama, kemaslahatan itu Harus sesuai dengan *muqashid al-syari'ah* semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalilnya; kedua, kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan

⁹³ Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cet. Ke-19, (Jakarta, Raja Grafindo, 2013), hal. 48-50.

penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat; ketiga, kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian etimologi dan terminologi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dijalaninya.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya dan warga negara lain umumnya, pemerintah membutuhkan *siyasah syar'iyah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi ummat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Fiqh siyasah atau *siyasah syar'iyah* juga dapat menjamin ummat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh ummat Islam.

Kajian fiqh lainnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan tata hubungan masyarakat seperti diketahui, keluarga adalah institusi terkecil dalam pembentukan masyarakat rumah tangga merupakan cikal bakal bagi tegaknya suatu masyarakat dan menjadi tonggak bagi terciptanya sebuah negara. Dari sistematika ini dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan.

Dalam fiqh siyasah-lah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintah, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Barangkali itu masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasah. Tapi untuk urusan kemaslahatan yang kompleks, ummat Islam membutuhkan fiqh siyasah.

Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh *nash*, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Untuk kasus Indonesia misalnya, keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat dikatakan sebagai bagian dari *siyasah syar'iyah* pemerintah Indonesia.

Dengan undang-undang tersebut, ummat Islam diberikan fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan institusi keagamaan mereka dalam rangka pelaksanaan dan penerapan hukum Islam itu sendiri. Disamping itu, kebijakan

pemerintah di bidang ekonomi dengan berdirinya bank Mu'amalat Indonesia juga merupakan sebagian dari praktik fiqh siyasah (*siyasah Maliyah*) yang bertujuan mengangkat taraf kehidupan ummat Islam menjadi lebih baik. Dan juga pemerintah menciptakan Undang-Undang tentang Perpajakan dimana retribusi parkir disetorkan ke kas negara guna untuk meningkatkan pendapatan daerah, itu juga merupakan sebagian dari praktik fiqh siyasah (*siyasah Maliyah*).

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Berbeda dengan ilmu yang sudah bersifat pasti (*qadh'i*). Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, fiqh adalah ilmu tentang pengetahuan atau hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsil*).⁹⁴

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh juga disebut dengan hukum Islam, karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek *muamalah* ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah*

⁹⁴ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Kencana, 2014), hal. 2-3.

(pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *mura'fa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).⁹⁵

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa fiqh *siyasah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh *siyasah*, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologi maupun terminologi konsep fiqh *siyasah* tersebut.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya “mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan”. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurus, pengawasan, perekayasa dan lainnya.⁹⁶

Secara etimologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'ruf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya, *siyasah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan,

⁹⁵ *Ibid*, hal. 3.

⁹⁶ A. Djali, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta, Kencana, 2003), hal 25-26.

meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.⁹⁷

Dengan demikian pengertian *fiqh siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Mujar Ibn Syarif dalam bukunya “*Fiqh Siyasah*” mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari *hal ihwal* atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dalam segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaannya yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *fiqh siyasah* dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.⁹⁸

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *Fiqh Siyasah*, maka dalam tahap perkembangannya dikenal beberapa bidang *Fiqh Siyasah*. Hasbi Ash Shiddieqy sebagai contoh yang membaginya dalam delapan bidang, yaitu: *Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah*, *Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah*, *Siyasah Qadha’iyyah Syar’iyyah*, *Siyasah Maliyyah Syar’iyyah*, *Siyasah Idariyyah Syar’iyyah*, *Siyasah Dawliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah*, *Siyasah Tanfiziyyah Syar’iyyah*, *Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah*.

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan menjadi pegangan. Secara garis besar,

⁹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), hal. 4.

⁹⁸ Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta, Erlangga, 2008), hal. 10.

sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi dua yaitu, sumber primer dan sumber sekunder, Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah menjadi tiga bagian yaitu, Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.⁹⁹

Selain sumber Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja menungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, *'Urf* atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

Metode kajian fiqh siyasah juga tidak jauh beda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah *qiyas*, *istihsan*, *'urf*, *maslahah mursalah*, dan *istishab*.¹⁰⁰ Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat *nash* Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

⁹⁹ *Ibid*, hal. 16.

¹⁰⁰ J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 29.

Fiqh siyasah adalah sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹⁰¹

Fiqh siyasah merupakan suatu ilmu atau faham yang membahas terkait pemerintah dan warga negaranya bahkan banyak juga yang menyebut fiqh siyasah adalah suatu cabang ilmu yang membahas terkait politik di suatu negara. Dalam suatu negara pastilah dipimpin oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan begitu pula konsep pemimpin dalam Islam atau yang biasa disebut *Ahlu Halli Wal Aqdi*.

Selain memimpin suatu negara seorang *Ahlu Halli Wal Aqdi* dalam melakukan tugas siyasah syari'iyah yaitu untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam dan batasan-batasan secara Islam maupun secara umum.

Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa pola kebijakan pemerintah mengenai aspek perekonomian yang menganut pengaturan salah satunya adalah siyasah maliyah yang membicarakan bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi serta mengelola suatu negara dalam aspek suatu perekonomian yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu terhadap Al-Qur'an dan Al-sunnah serta kaidah-kaidah fiqh siyasah yang dikemas dalam aturan perundang-unangan yang berlaku dengan tujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 13.

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu: Pertama, *Siyasah Dusturiyyah* disebut juga dengan politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintah (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, *Siyasah Dawliyyah/Siyasah Kharijiyyah*, disebut juga dengan politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan anatar warga negara yang muslim dengaabdn warga negara yang bukan muslim. Di bagian ini ada politik masalah peperangan, (*siyasah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, tawanan perang dan gencatan senjata. Ketiga, *Siyasah Maliyyah*, disebut juga dengan politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak dan perbankan.¹⁰²

1. Siyasah Dusturiyah

Ketidaktaatan warga masyarakat terhadap suatu hukum atau peraturan merupakan salah satu kendala yang dapat menurunkan efektivitas hukum dari hukum atau peraturan tersebut. Selain itu masyarakat merupakan subjek maupun objek hukum itu sendiri yang merupakan faktor utama bagi bekerjanya hukum karena hukum diciptakan dan dilaksanakan oleh manusia dan begitu juga dengan peraturan daerah, yakni Peraturan daerah kota Medan nomor 7 tahun 2002 sangat

¹⁰² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Kencana, 2014), hal. 15.

bagus peraturan yang memuat di dalamnya. Akan tetapi, pelaksanaan peraturan yang telah dibuat tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara yaitu Dinas Perhubungan kota Medan dengan petugas parkir melalui masyarakat yang menggunakan perparkiran. Praktik parkir sebagai sistem yang memiliki tujuan, yakni untuk memperlancar jalannya lalu lintas, untuk menempatkan suatu kendaraan agar tidak memenuhi lokasi yang akan dilewati atau digunakan oleh sekelompok manusia, untuk mengamankan yaitu mengamankan kendaraan yang diparkirkan, sehingga pemilik kendaraan dapat dengan nyaman melakukan kegiatannya.

Adapun jaminan atas hak asasi manusia kepada juru parkir seharusnya Dishub menyediakan dan memfasilitasi jaminan sosial termasuk asuransi sosial bagi petugas parkir yang telah resmi ditetapkan, dalam hal ini petugas parkir resmi mencari nafkah yang sangat rentan terhadap resiko kecelakaan kerja. Oleh sebab itu seharusnya pihak Dishub menyediakannya agar terciptanya jaminan atas hak asasi manusia.

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada ketegasan akan peraturan yang telah dibuat, pada dasarnya peraturan daerah adalah yang menyangkut masalah-masalah hubungan timbal-balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Dalam hal ini, peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah sudah sangat terperinci dengan bagus dan seksama akan tetapi, pelaksanaannya ini tidak baik dalam menerapkannya, seperti Peraturan daerah nomor 7 tahun 2002 tentang

pengelolaan pelataran parkir sangat jauh berbeda yang terjadi di lapangan. Dikatakan dalam Perda kota Medan pasal 8 sejajar atau paralel, akan tetapi dilapangan sangat kacau dan berantakan juga tidak adanya rambu parkir.

Dalam hal tujuan pemerintah menjalankan aturan yang sudah dibuat demi tercapainya kesejahteraan rakyat mengenai masalah pelayanan publik yakni perparkiran, di sini penulis mengungkapkan bahwa pemerintah membuat aturan secara tertulis hanya sebagian besar yang terlaksana, contohnya dalam hal retribusi parkir, mengenai tarifnya tidak sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat juga tidak adanya ketegasan pemerintah akan hal ini, lalu pemberian karcis parkir seharusnya pemberian karcis parkir tersebut adalah hal yang wajib bagi para pengguna perparkiran akan tetapi di lapangan karcis parkir itu tidak diberikan sama sekali terkecuali diminta dari juru parkir, selanjutnya pengaturan dan letak tata kendaraan yang terparkirkan sampai jalanan yang hancur, lambat kesadaran pemerintah akan hal ini.

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan.

Dalam fiqh siyasah, siyasah dusturiyah tersebut membahas masalah perundang-undangan negara hampir sama dengan politik. Persamaan ini terlihat

dari dua unsur yang terdapat pada keduanya, yakni pihak yang mengatur dan pihak yang diatur. Kedua unsur ini adalah unsur yang sangat penting dan bersifat timbal balik, baik dalam fiqh siyasah maupun dalam ilmu politik. Menurut Prof. H. A. Djazuli, fiqh siyasah mirip dengan politik, karena ada dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat, yang diatur atau di perintah.

Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.¹⁰³

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan staratafikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

A Djazali mengartikan bahwa permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah ini biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-

¹⁰³ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 177-178.

undangan yang dutuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia memenuhi kebutuhannya.¹⁰⁴

A Djazali mengupas ruang lingkup bidang *Siyasah Dusturiyyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Lebih lanjut A. Djazali mempetakan bidang *Siyasah Dusturiyyah* menyangkut persoalan yaitu, imamah, hak dan kewajiban, rakyat, hak dan kewajiban, bai'at, waliyu al'ahdi, perwakilan, *ahlul halli wa al-'aqdi*, *wuzarah* dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian *Siyasah Dusturiyyah* meliputi, konstitusi, legislasi, ummah dan *shura* atau demokrasi.¹⁰⁵

Konsep kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiyah* negara Islam, oleh Abdul Wahhab Kallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Pertama, lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kedua, lembaga eksekutif (*sultah tanfidiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang. Ketiga, lembaga yudikatif (*sultah qadha'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.¹⁰⁶

¹⁰⁴ A. Djazali, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta, Kecana, 2003), hal 47.

¹⁰⁵ Imam Amrusi Jalani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya, IAIN Press, 2011), hal. 25-27.

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 29.

Adapun pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara pembantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang-orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lainnya.

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum tata negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qada'*, *Wilayah al-Mazalim*, dan *Wilayah al-Hisbah*. *Wilayah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perkara perdata maupun pidana.

Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan *amar ma'ruf* ketika yang *ma'ruf* mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilayah al-Hisbah* adalah sesuatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilayah al-Qada'*. Wewenang *Wilayah al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemunkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridho Allah SWT.

Adapun *Wilayah al-Mazalim* merupakan kekuasaan pengadilan yang bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah, gubernur dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.¹⁰⁷ *Wilayah al-Mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya untuk menyelesaikan persengketaan

¹⁰⁷ A, Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta, Amzah, 2012), hal. 113.

antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan penguasa disini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintah mulai dari tertinggi sampai pejabat paling rendah.

Jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan suatu negara. Untuk konteks negara Indonesia, wewenang yang dimiliki hakim Mahkamah Konstitusi dapat ditarik persamaan dengan apa yang pernah diterapkan *Wilayah al-Mazalim* pada masa lalu. Karena bagaimanapun, kezaliman pada konstitusi atau merampas akses politik rakyat merupakan kezaliman pejabat negara yang mengkhianati kedaulatan.¹⁰⁸

Tinjauan Fiqh Siyasah yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah *Siyasah Dusturiyah*, dimana permasalahan yang penulis teliti berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang sudah ada demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang bisa dikatakan dengan *Maslahatul Mursalah*. Sedangkan hasil dari penelitian, pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir belum efektif dalam mengimplementasikan Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Tinjauan Fiqh Siyasah yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah *Siyasah Dustutiyah*, dimana permasalahan yang penulis teliti berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang sudah ada demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 114.

bisa dikatakan dengan *Maslahatul Mursalah*. Sedangkan hasil dari penelitian, pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir belum efektif dalam menerapkan Perda (Peraturan daerah) Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Penelitian ini dapat dikatakan bahwa mekanisme pemungutan parkir di kota Medan tidak begitu optimal jika dilihat dari pendapatan retribusi parkir. Dalam penetapan tarifnya kebijakan pemerintah tersebut harus direalisasikan dengan tujuan hukum Islam khususnya mengacu pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah siyasah maliyah seperti prinsip keadilan dan masalah mursalah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS An-nisa: 59)

Berdasarkan ayat di atas sebagai umat manusia diwajibkan atas kita mematuhi atau mentaati peraturan yang di buat oleh Allah SWT dan RasulNya sehingga pada peraturan ini menimbulkan atau mendatangkan kebaikan kepada umat manusia. Di dalam objek kajian Fiqh Siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan

kemaslahatan bersama sehubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan.

Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadha'iyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*). Dan dalam skripsi ini peneliti akan membahas salah satu Fiqh Siyasah yaitu *siyasah maliyah*.

Setelah peneliti mengajukan kajian secara mendalam terdapat sebuah kesimpulan bahwa Peraturan daerah nomor 7 tahun 2002 telah menerapkan peraturan yang ada di dalamnya yang sudah menerapkan nilai-nilai siyasah antara lain peraturan yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, yang berorientasi pada kemaslahatan, yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan persamaan hak dan didasari pada prinsip musyawarah.

2. Siyasah Maliyah

Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, di dalam siyasah maliyah di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut konsep tentang sumber-sumber pemasukan dan kaidah-kaidah dalam pembelanjaan keuangan negara. Potensi retribusi daerah sebagai sumber utama pendapatan asli daerah sangat besar, akan tetapi potensi tersebut belum berjalan secara optimal karena kurangnya kebijakan dan peraturan yang mendukung kesadaran wajib retribusi kota Medan merupakan

kota berkembang sebagian tempat keramaian pertokoan, pasar dan tempat wisata, dimana terdapat sarana-sarana yang dijadikan objek retribusi parkir untuk pemasukan pada keuangan daerah.

Adapun tentang masalah uang retribusi yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dari juru parkir itu hanya sebagian kecil, uang retribusi parkir masuk ke kas negara. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian rupa, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah retribusi termasuk retribusi parkir. Dimana yang terjadi di lapangan, retribusi parkir tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dikatakan bahwa dalam peraturan tersebut tarif retribusi parkir menjadi Rp. 2000 yang tadinya Rp. 500 untuk sepeda motor atau kendaraan roda dua, sedangkan untuk kendaraan roda empat menjadi Rp. 3000-5000 yang tadinya Rp. 1000. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan tempat parkir, akan tetapi tarif retribusi parkir di lapangan sangat jauh berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya wajib retribusi khususnya retribusi parkir. Tanpa kesadaran masyarakat, pelaksanaan pemungutan retribusi akan mengalami kesulitan. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Medan masih terlihat banyak pengguna parkir yang membayar tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, selain itu

juga banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat, padahal jelas sekali terdapat tanda larangan parkir. Tetapi masih tetap memarkirkan kendaraannya dengan alasan-alasan yang dibuat-buat, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi yang seharusnya mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Pengelolaan keuangan negara khususnya retribusi parkir, memberikan pengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan pembayaran daerah, yang bersumber dari masyarakat dimana pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap cara kerja para juru parkir. Menurut Dishub kota Medan pengelolaan keuangan negara melalui retribusi parkir, setiap harinya uang retribusi parkir di setor ke kas negara. Akan tetapi, uang retribusi parkir yang diterima dari juru parkir itu terkadang kurang dari jumlah setoran yang sudah ditetapkan dengan alasan yang menggunakan parkir pada hari itu sedikit.

Penelitian ini bertolak bahwa pola kebijakan pemerintah mengenai aspek perekonomian yang menurut pengaturan salah satunya adalah siyasah maliyah yang membicarakan bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi serta mengelola suatu negara dalam aspek perekonomian yang ditinjau dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah serta kaidah-kaidah fiqh siyasah yang dikemas dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan memenuhi hajat hidup orang banyak.

Di dalam kajian Siyasah Maliyah dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa' al-Rasyidun serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasah Maliyah ini

merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad Saw. beserta pengikutnya menetap di Madinah.

Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini antara lain di bahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara.

Sumber keuangan negara menurut Abu Yusuf, seperti dikutip T.M. Hasbi *ash-Shiddieqy*, yang telah ditetapkan syara' yaitu *khumus al-ghanaim*, sedekah dan kharaj. Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan negara yang sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan negara Islam hingga saat ini adalah zakat, *khumus al-ghanaim*, *al-fai'*, *jizyah*, *usyr*, *al-tijarah* dan pajak serta sumber-sumber lainnya.¹⁰⁹

Dalam ajaran Islam, pengelolaan keuangan negara diatur dan dijelaskan secara mendetail melalui pemikiran para ulama'. Ketika mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam, maka akan ada pembahasan yang mengatur mengenai sumber dari pendapatan negara Islam begitupun juga cara pengelolaannya. Baitul Maal memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan negara dalam Islam. *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan negara dalam Islam yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan

¹⁰⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001), hal. 273.

maupun pengeluaran negara.¹¹⁰ *Baitul Maal* mempunyai tugas utama untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup minimal masyarakat suatu negara.¹¹¹

Berdasarkan Fiqh Siyasah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan Fiqh Siyasah terhadap retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di kota Medan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2002 mengkaji di dalam kajian *siyasah maliyah* ini membahas tentang sumber keuangan negara, kajian *siyasah maliyah* dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh Khulafa' al-Rasyidun serta pemerintah Islam sepanjang sejarah.

Siyasah maliyah merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad Saw, beserta pengikutnya menetap di Madinah. *Siyasah maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini antara lain di bahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara.

Sumber-sumber keuangan negara, menurut Abu Yusuf, seperti dikutip T.M. Hasbu ash-Shiddieqy, meliputi mawardi al-dawlah yang telah ditetapkan syara, yaitu khumus al-ghanaim, sedekah dan Kharaj. Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan negara yang bagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan negara Islam hingga saat ini adalah zakat,

¹¹⁰ Ali Sakti, *Ekonomi Islam* (Jakarta, Paradigma dan Aqsha, 2007), hal. 176.

¹¹¹ Andi Warman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta, PT. Grafindo, 2003), edisi kedua, hal. 240.

Khumus al-ghanaim, al-fai', jizyah, usyr al-tijarah dan pajak serta sumber-sumber lainnya.¹¹²

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Khumus al-Ghana'im adalah harta yang diperoleh ummat Islam melalui jalan peperangan. Fai' adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan.

Jizyah adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dar al-Islam yang bukan muslim kepada pemerintah Islam. Jizyah ini dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka.

Usyur al-Tijarah adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam. Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam atau bisa dikatakan sebagai pajak pertanian yang dikenakan kepada orang non muslim.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemungutan retribusi parkir di kota Medan, untuk pemungutannya masih banyak kebocoran yang terjadi di lapangan, penerapan tarif parkir sudah di atur dalam perda, akan tetapi masih banyak pelanggaran yang di buat oleh pengelola parkir dalam penetapan tarifnya, kebijakan pemerintah tersebut harus di realisasikan dengan

¹¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001), hal. 273.

tujuan hukum Islam dan mengacu pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah siyasah maliyah seperti prinsip keadilan dan maslahah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan pengelolaan dan retribusi parkir di tepi jalan umum di Jalan Sutomo dan Rumah Sakit Murni Teguh dalam Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 belum terimplimentasi dengan baik di tengah masyarakat.

Adapun rincian kesimpulan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Pertama, pengelolaan pelataran parkir pada Perda kota Medan nomor 7 tahun 2002 belum secara optimal karena lahan parkir belum terkelola dengan baik dan dalam mengurangi kemacetan juga masih belum secara optimal karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan dari Dinas Perhubungan khususnya bidang perparkiran. Dan tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam melayani parkirnya tidak begitu berjalan secara optimal untuk mengeluarkan masukkan sepeda motor padahal sudah jelas sekali tugas juru parkir itu menata dan mengeluarkan masukkan sepeda motor.

Kedua, aturan retribusi pengelolaan parkir di Kota Medan menurut Perda kota Medan nomor 7 tahun 2002 tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan, ada beberapa hal yang terjadi dalam pelayanan retribusi parkir di Kota Medan, seperti penarikan tarif parkir oleh juru parkir untuk sepeda motor yang menjadi Rp. 2.000 yang idealnya Rp. 500 serta tarif parkir untuk kendaraan roda empat yang

menjadi Rp. 3000 sampai Rp. 5000 yang idealnya Rp. 1000 dan hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan daerah kota Medan nomor 7 tahun 2002 dan ini sudah jelas melanggar aturan yang sudah ditetapkan di dalam peraturan daerah tersebut.

Ketiga, tinjauan fiqh siyasah terhadap pengutipan pajak retribusi parkir di kota Medan berdasarkan perda kota Medan nomor 7 tahun 2002 yaitu tidak sesuai dengan siyasah maliyah yang diterapkan oleh pemerintah tetapi sesuai dengan siyasah dusturiyah. Oleh karena itu, masyarakat harus patuh terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

B. Saran

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, agar pengelolaan dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menurut Perda nomor 7 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir dan perizinan pelataran parkir, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan kota Medan untuk lebih memperhatikan keaktifan kerja dari elemen-elemen pemerintah maupun yang turut serta adil dalam melakukan kebijakan retribusi tersebut. Dan hendaknya Dinas Perhubungan Kota Medan dapat mencari solusi atas permasalahan yang menjadi faktor tidak efektifnya retribusi Perda No. 7 Tahun 2002 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum khususnya di jalan Sutomo dan di perparkiran depan rumah sakit Murni Teguh.

2. Diharapkan kepada juru parkir dan koordinator lapangan di Kota Medan khususnya di jalan Sutomo dan di perparkiran depan rumah sakit Murni Teguh untuk menaati aturan dan ketentuan yang berlaku agar dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dengan harapan terciptanya ketentraman, ketenangan dan kerapian jalan. Dan juga bagi juru parkir harus lebih ditekankan untuk menerapkan pemberian karcis sebagai bukti pembayaran bagi setiap pengguna jasa parkir demi menunjang pelaksanaan perparkiran dan pemungutan retribusi parkir.
3. Diharapkan kepada pemerintah kota Medan setiap melakukan rancangan Peraturan Daerah haruslah terlebih dahulu mengadakan evaluasi setiap bulan atau beberapa bulan sekali bagi semua juru parkir. Sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah pada sektor retribusi parkir harus adanya upaya Pemerintah, memuat aspek partisipasi masyarakat agar benar-benar terlaksananya Peraturan Daerah sesuai dengan isi yang sudah dibuat.
4. Serta peran masyarakat diharapkan semestinya mematuhi dan sadar hukum atas pungutan yang dilakukan oleh pemerintah demi meningkatkan ketentraman, ketenangan dan kerapian jalan dan masyarakat akan menjadi lebih tenang.
5. Kepada pihak fakultas memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian yang senada dengan penelitian ini.
6. Diharapkan kepada mahasiswa agar bisa melanjutkan penelitian tentang pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di lokasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012)
- Abubakar. Iskandar dkk. 1998. E-book : *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian fasilitas parkir*. Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota, Direktorat Jendral Perhubungan Darat : Jakarta
- Adisasmita, Raharjo dan Sakti Adji Adisasmita, *Manajemen Transportasi Darat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Alamsyah, A. A., *Rekayasa Jalan Raya*, (Malang: UMM Press, 2001)
- A. Djazali, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta, Kencana, 2003)
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Akmal, *Kepemimpinan dan Kebijaksanaan Khilafah Rasyidin*, (Pekanbaru: Benteng Media, 2014)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Persada, 2003)
- Abu Samah, *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru, Benteng Media, 2018)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- B.N. Marbun, *Kota Indonesia Masa Depan*, (Jakarta: Erlangga, 1994)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 2006)
- Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Direktorat Jendral Bina Marga, *Tata Cara Perencanaan Geometri Jalan Raya Antar Kota*, (Jakarta: Salemba, 1997)
- Early Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empa, 2000)
- Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

- E. Novianto, *Studi Efektifitas Pengaturan Parkir Kendaraan Bermotor Di Kota Malang (Studi Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Parkir)*, Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2016)
- Fauzi, Noer, *Otonomi Daerah Sumber Daya Alam Lingkungan*, (Jakarta: Lipera Pustaka Utama, 2003)
- Gorys Keraf, *Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (Nusa Tenggara Timur: Nusa Indah, 1994)
- Hadisoeparto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008)
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Hardiyatmo, H.C., *Pemeliharaan Jalan Raya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007)
- Imam Amrusi Jalani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011)
- J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Jamer, Stoner A.F dan Freeman R. Edwar, *Manajemen Edisi ke Empat*, (Jakarta: Intermedia, 1992)
- Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonom*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- M. Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN MALIKI Press, 2010)
- M. Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh,m* (Jakarta: Pustaka Setia, 2007)
- Mujar Ibn Syarif Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- N. Daljoeni, *Geografi Kota dan Desa*, (Bandung: 1998)

- Partogi, Pasaribu., Andreas, *Jurnal Sosial Ekonomi, Faktor Penyebab Terjadinya Klaim yang Mempengaruhi Kinerja Waktu Proyek Konstruksi Jalan Tol di Jabodetabek*, (Jakarta: Salemba, 2010)
- Siahaan. N.H.T, *Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan*, (Jakarta: Airlangga, 1987)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Alfabeda, 2008)
- Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suharsimi Arikunta, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Soenkanto. Soerjono, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Sukirman, Silvia, *Perkerasan Lentur Jalan Raya*, (Bandung: Badan Penerbit Nova, 1999)
- Tmbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013)
- Wahyudi Kuorotomo, *Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan Kebijakan*, (Jakarta: Kecana, 2004)
- Willy Tri Hardianto, *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD, Ilmu Administrasi Negara di FISIP*, (Batu: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggal dewi, 2012)

Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Jurnal / Artikel / Makalah

Jufrizen, Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat – Pusat Perbelanjaan Kota Medan, Artikel Dosen Fakultas Ekonomi Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2011.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir.

Website

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/06/30/243307/menata-parkir-dan-lalu-lintas-kota-medan/#.WNM-Is2SV3M>, diakses tanggal 1 Agustus 2019.


<http://www.malangstreetfire.com/read/Opini/3733-Parkir-Liar-Masih-Diantara-Retribusi-Tinggi-dan-Tanpa-Pelayanan>, diakses tanggal 01 Agustus 2019.

<http://medan.tribunnews.com/2015/11/30/masalah-izin-parkir-di-medan-masih-tumpang-tindih>, diakses tanggal 1 Agustus 2019.

Lampiran-lampiran

1. Surat Penelitian

a. Surat penelitian fakultas

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM</p> <p>Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-661568 Medan Estate</p>
<hr/>	
<p>Nomor : B.2072/SH II/PP.009/03/2020 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Izin Riset</p>	<p>Medan, 02 Maret 2020</p>
<p>Yth : <u>Kepala Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan</u></p>	
<p>Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi Mahasiswa :</p>	
<p>Nama : Hafifah Amini NIM : 23153060 Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 02 Mei 1997 Semester / Jurusan : IX/ Siyasah Alamat : Jalan Letda Sujono Gg. M. Idris No. 392 Medan Tembung</p>	
<p>Judul skripsi :</p>	<p>" Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap retribusi parkir di tepi jalan umum menurut Peraturan daerah nomor 7 tahun 2002 (studi kasus di jalan sutomo dan depan rumah sakit murni teguh di Kec. Medan Timur)".</p>
<p>Pembimbing skripsi :</p>	<p>1. Dr. M. Iqbal Irham, M. Ag 2. Afifah Rangkuti, M. Hum</p>
<p>Kami mohon kesediaan saudara memberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul skripsi diatas.</p>	
<p>Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>	
<p>a.n. Dekan. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan</p>	
<p>Dr. Syafruddin Syam, M. Ag NIP. 197505312007101001</p>	
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas Syariah UIN- SU Medan 2. Ybs 	

b. Surat balasan Dinas Perhubungan



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris No.114-A Medan Kode Pos 20127
 Telp. (061) 8450542

Medan, 16 Maret 2020

Nomor : 070/ 1118 /DISHUB/III/2020

Lamp. : -

Perihal : Pernyataan Selesai
Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth :
 Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
 Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Di -

Medan

Dengan hormat ;



1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/310/Balitbang/2020 Tanggal 04 Maret 2020 Perihal : Surat Rekomendasi Penelitian An. Hafifah Amini ; NIM : 23153060 ; Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Menurut Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2002 (Study Kasus di Jalan Sutomo dan Depan Rumah Sakit Murni Teguh di Kec. Medan Timur).
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN



IMELDA HERLINA, SH.MSi
 PEMBINA
 NIP. 19710312 199803 2 003

c. Surat dari kantor Walikota Medan

 PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112 Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693 E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id Website : balitbang.pemkomedan.go.id	
<u>SURAT REKOMENDASI PENELITIAN</u> NOMOR : 070/310 /Balitbang/2020	
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat dari : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nomor: B.2072/SHI/PP.009/03/2020 Tanggal : 02 Maret 2020 Hal : Izin Riset.	
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :	
Nama	: Hafifah Amini.
NIM	: 23153060.
Semester/Jurusan	: IX/ Siyazah.
Lokasi	: Dinas Perhubungan Kota Medan dan Kecamatan Medan Timur Kota Medan.
Judul	: "Tinjauan Fiqh Siyazah terhadap Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Menurut Peraturan Daerah No 7 Tahun 2002 (Studi Kasus di Jalan Sutomo dan Depan Rumah Sakit Murni Teguh di Kec.Medan Timur)".
Lamanya	: 1 (Satu) Minggu.
Penanggung Jawab	: Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
Dengan ketentuan sebagai berikut :	
1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan. 2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian. 3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan. 4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy. 5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan. 6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.	
Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Dikeluarkan di : Medan. Pada Tanggal : 04 Maret 2018 An.KEPALA BALITBANG KOTA MEDAN SEKRETARIS,  Siti Nahrani Hasibuan NIP. 19661208 198603 2 002	
Tembusan :	
1. Walikota Medan (sebagai Laporan). 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan 3. Camat Medan Timur Kota Medan. 4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU. 5. Yang Bersangkutan. 6. Peringgal	

2. Peta lokasi

a. Kota Medan



b. Medan Timur



3. Daftar pertanyaan wawancara

a. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan

Transkrip wawancara

Nama informan : Indra Siregar, S.H

Pekerjaan : PNS

Usia : 56 tahun

Jabatan : Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan

Lokasi wawancara : Kantor UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan

Tanggal wawancara : 11 Agustus 2020

Saya : Apa yang bapak ketahui tentang izin pengelolaan pelataran parkir?

Bapak : Pelataran? Pelataran parkir pada prinsipnya adalah satu tempat penggunaan parkir yang di dalamnya terdapat retribusi pengelolaan baik itu pembayaran parkir kendaraan dan pembayaran tempat parkir. Pelataran yang dimaksud kayak gedung contohnya gedung Sun Plaza ini segala macam itu termasuk pajak, pajak parkir, prasarana parkir ya dalam fungsinya pembayaran sistem bukan dalam bentuk retribusi tapi dalam bentuk pajak, pajak itu apalagi di atur dalam Dispenda (Dinas pendapatan daerah) bukan kita yang mengelola itu.

Saya : Berarti beda ya pak antara retribusi parkir dengan pajak parkir?

Bapak : Ya beda dong, retribusi itu kami yang di jalan umum saja yang di bahu jalan, yang dipelataran gedung apa segala macam itu pajak.

Saya : Apakah ada landasan hukum izin pengelolaan pelataran parkir?

Bapak : Ya ada landasan hukumnya itu Perda, yang terbaru itu Perda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017.

Saya : Begini pak, pembahasan skripsi saya ini pak berlandaskan Perda Nomor 7 Tahun 2002, apakah ada Perda terbarunya pak?

Bapak : Itu sudah perda lama, perda terbarunya itu Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan itu menyangkut masalah ada di dalamnya itu tentang parkir, kemudian peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 tentang retribusi daerah di bidang perhubungan, peraturan walikota nomor 50 penyelenggaraan perparkiran.

Saya : Apakah Dishub mengatur parkir dan jalan raya, pak?

Bapak : Mengatur parkir di ruas jalan, yang disebut *outstreet* bukan *offstreet*. Kalau di pelataran itu pajak, pajak *offstreet* itu di jalan maksudnya di ruas jalan kalau di pelataran namanya pajak.

Saya : Jadi pak yang membedakannya itu apa?

Bapak : Kalau parkir di atas pelataran itu pajak parkir, kalau parkir dalam pelataran itu juga kutipannya pajak, kalau parkir di tepi jalan umum itu retribusi. Kalau pajak itu ke Dispenda dan kalau retribusi parkir itu kemari Dishub.

Saya : Apakah ada sanksi untuk tidak mengikuti aturan parkir?

Bapak : Ada di atur dalam undang-undang, bahwa parkir 45 dia membuat sejajar itukan ada peraturan dari undang-undang nomor 22 pelanggaran perintah dan larangan.

Saya : Apa pendapat bapak mengenai parkir liar yang sudah marak terjadi di Kota Medan ini?

Bapak : Apa yang kamu ketahui tentang parkir liar?

Saya : Parkir yang berada di bahu jalan.

Bapak : Ya sudah parkir liar itu dia sudah melanggar ketentuan pemerintah, ketetapan itu. Karena setiap parkir itu harus resmi dikelola oleh pemerintah daerah dalam arti kata dikelola Dinas Perhubungan Kota Medan, itu sudah menyangkut ke pidana umum. Artinya dia tidak resmi di situ berarti liar, liar itu berarti tanpa ada dasar dia melakukan pengutipan di tempat itu. Kita tidak mengurus parkir yang liar tetapi kita mengawasi terhadap lokasi-lokasi parkir yang tidak ada izinnya bekerja sama dengan pihak kepolisian.

Saya : Oh berarti pihak Dishub sendiri mengawasi hal tersebut saja ya pak?

Bapak : Pengawasan, penindakan terhadap liar itu adalah pihak penegak hukum.

Saya : Pendapat bapak untuk mengurangi keberadaan parkir liar itu apa pak?

Bapak : Misalnya contoh, kalau sudah liar itu polisi yang menindak itu semua. Ya namanya liar dia mengutip uang tidak resmi berartikan uang itu uang tidak resmi. Berartikan kalau sudah diminta, disetorkannya bukan ke Dishub. Maka dari itu Dishub bekerja sama dengan timlah untuk mengatasi penindakan terhadap parkir-parkir liar, bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan penertiban yang dilakukan oleh tim dari polisi sampai TNI sebagai pengaman jika terjadi kericuhan.

Saya : Jadi pak parkir itu menjadi pemasukan daerah atau tidak?

Bapak : Ya menjadi pemasukan daerahlah.

Saya : Perbulannya berapa itu pak di setorkan ke kas negara?

Bapak : Oh itu gak tentu, ruas jalan itu berbeda-beda.

Saya : Skripsi saya ini pak meneliti parkir di depan rumah sakit murni teguh, tukang parkir itu berapa mereka setor pak?

Bapak : Dia ada kelas parkirnya, kalau kelas 1 Rp. 2.000 kelas II Rp. 3.000.

Saya : Jadi pak, pihak Dishub sendiri yang mengutip tiap hari uang parkirnya kelapangan ya pak?

Bapak : Yang mengutip ke tukang parkir itu pengawas dari pihak Dishubnya.

b. Petugas parkir rumah sakit murni teguh

Transkrip wawancara

Nama informan : David

Pekerjaan : Juru parkir di depan rumah sakit murni teguh

Usia : 27 tahun

Lokasi wawancara : Parkir di depan rumah sakit murni teguh

Tanggal wawancara : 11 Agustus 2020

Saya : Abang punya surat perintah bekerja atau gak? Resmi gak bang?

Jukir : Ada, saya punya surat perintahnya. Ya saya jukir yang resmi.

Saya : Kemana uang parkir itu di setorkan bang?

Jukir : Ke rumah masing-masing. Dan di setorkan ke Disbuh juga ada.

Saya : Kalau di setorkan ke Disbuh berapa persen penyetorannya?

Jukir : Ya kadang gak tentulah, kadang 60% kadang 70% ya gitulah.

Saya : Disini ada tidak bang ketentuan untuk membuat lapak parkir?

Jukir : Ada, pakai batasan dia. Dari pagi kesore setoran dan sore ke malam tidak setoran.

Saya : Apakah ada kaitan juru parkir dan Disbuh?

Jukir : Ada, ada surat perintahnya itu di bed namanya, itu surat perintahnya.

Saya : Masalah karcis parkir ini bang, abang kasih apa tidak ke pengguna parkir di sini?

Jukir : Ya di kasih kalau diminta, kalau tidak diminta tidak di kasih.

Saya : Berapa bang sekali parkir di sini untuk kereta dan mobil?

Jukir : Kalau kereta Rp. 3.000, kalau mobil Rp. 5.000.

Saya : Ada tidak bang yang ngasih uang parkir gak sesuai yang ditetapkan?

Jukir : Ya ada, tapi itu gak masalah tinggal di kantong aja sudah selesai.

Saya : Berapa besar tarif retribusi parkir dalam sehari bang?

Jukir : Gak tentu berapanya, kadang pas pasan untuk disetorkan ke Dishub kadang belehah ya masuk kantong.

Saya : Disini pernah ada kehilangan kereta atau helm gitu bang?

Jukir : Kalau kehilangan kereta gak pernah, karna udah kita suruh buat kunci ganda kendaraan, paling yang sering hilang helm-helm yang bagus yang cuma diletakkan di kaca sepiion aja.

Saya : Tugas seorang juru parkir itu apa aja bang?

Jukir : Tugas kami itu ya menjaga kendaraan, konsumen sudah menitipkan kendaraannya ke kami ya harus kami jaga. Menyusun kendaraan sesuai aturan parkir biar kendaraan lain bisa lewat dan gak buat macat.

Saya : Kenapa buka lahan parkir di tepi jalan gini bang, kan di dalam juga ada parkir buat orang mau menjenguk keluarganya kenapa di luar juga disediakan lahan parkir?

Jukir : Memang di dalam ada tempat parkir juga, tapi di dalam lebih banyak yang parkir karyawan kadang di dalam sudah gak muat untuk parkir makanya kita buka parkir di luar seperti ini.

Saya : Itu aja sih bang yang mau saya tanyakan, terima kasih atas waktunya bang.

Jukir : Iya gapapa, sama-sama.

c. Petugas parkir jalan sutomo

Transkrip wawancara

Nama informan : Firmansyah Lubih

Pekerjaan : Juru parkir di jalan sutomo

Usia : 48 tahun

Lokasi wawancara : Jalan sutomo kecamatan medan timur

Tanggal wawancara : 11 Agustus 2020

Saya : Apakah bapak petugas resmi parkir?

Jukir : Iya, saya petugas resmi parkir di sini.

Saya : Bapak punya surat resmi sebagai petugas parkir?

Jukir : Ini di bed nama saya, ini surat perintah juru parkir saya.

Saya : Bapak bekerja di sini ditugaskan Dishub atau tidak?

Jukir : Saya mengajukan diri ke Dishub untuk memegang parkir di jalan sutomo ini, terus Dishub ngasih izin terus dikasih orang Dishub bed nama ini.

Saya : Bapak tau tidak kaitan juru parkir dengan Dishub?

Jukir : Juru parkir sama Dishub itu kaitannya atas dasar kerja sama, uang parkir yang sudah di kutip ya kami kasih ke Dishub, nanti sore ada itu orang Dishub yang mengutip.

Saya : Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk parkir di sini pak?

Jukir : Untuk kereta Rp. 2.000 terus kalau mobil Rp. 3.000, kadang ada yang ngasih kurang kadang juga ada yang ngasih lebih.

Saya : Berapa besar retribusi parkir atau uang parkir yang udah terkumpul dalam sehari pak?

Jukir : Gak tentu berapanya dalam sehari, kadang cuma cukup untuk menyetorkan ke Dishub kadang lebih ya masuk kantong.

Saya : Uang parkir ini disetorkan kemana pak?

Jukir : Ke Dishub aja cuma

Saya : Apakah boleh pak memarkirkan kendaraan di sembarang tempat, bukan daerah kekuasaan parkir bapak?

Jukir : Di sembarang tempat kalau masih di tempat saya mengutip parkir ya gapapa gak masalah, asalkan sudah daerah kekuasaan parkir yang lain saya gak berhak meminta uang parkir kendaraan itu.

Saya : Kalau parkir di sini pak, bapak kasih karcis parkirnya gak?

Jukir : Gak pernah saya kasih, paling kalau ada yang minta saya kasih. Percuma pun di kasih karcis parkirnya tapi dibuangin orang yang parkir lebih bagus gak usah di kasih.

Saya : Pihak Dishub sendiri ada ngasih karcis parkir ke bapak selaku petugas parkir di jalan sutomo ini?

Jukir : Iya ada Dishub ngasih karcis.

Saya : Kalau bapak menyetorkan uang ke Dishub, pihak Dishub sendiri meminta kembali karcis parkir yang sisa gak pak?

Jukir : Gak pernah Dishub minta karcisnya, orang itu cuma minta uang setorannya aja.

d. Masyarakat

Transkrip wawancara

Nama informan : Agus

Pekerjaan : Driver grab

Usia : 40 tahun

Lokasi wawancara : Di depan mall centre point Medan

Tanggal wawancara : 11 Agustus 2020

Saya : Bapak tau parkir liar itu seperti apa, dan apa tanggapan bapak?

Bapak : Parkir liar itu parkir yang sembarang tempat, ya itu jelas gak bagus dan uangnya pasti fi kantong sama yang mengutip dan di kasih ke pemerintah.

Saya : Bapak pernah menggunakan parkir liar pak?

Bapak : Pernah sih, karena kepepet waktu pada saat itu.

Saya : Bapak tau parkir yang di depan rumah sakit murni teguh itu bukan di dalam rumah sakitnya ya pak tapi di depannya terus sama parkir yang di jalan sutomo? Bapak pernah parkir di situ? Menurut bapak itu parkir liar atau bukan?

Bapak : Saya pernah parkir di di depan rumah sakit murni teguhnya ada yang di jalan sutomo itu gak pernah saya parkir disana, tapi saya tau parkir di jalan sutomo itu. Ya kalau menurut saya sih itu parkir legal ya soalnya orang juru parkirnya punya bed nama yang dikalungkan orang itu di lehernya. Menurut saya sih itu bukan parkir liar.

Saya : Bagaimana tanggapan bapak tentang parkir liar?

Bapak : Tanggapan saya ya biar aja mereka buat parkir liar, yang banyak buat parkir liar itukan anak-anak muda setempat, daripada mereka mencuri lebih bagus kerja kayak gitu uangnya bisa di kantong mereka. Juga masyarakat pengguna parkir itu pun lebih mudah menitipkan kendaraannya.

Saya : Kalau bapak menggunakan lahan parkir, apa bapak meminta karcis parkir ke tukang parkirnya?

Bapak : Tidak pernah saya minta kecuali tukang parkirnya yang ngasih, paling karcis parkir kalau saya parkir di mall yang sudah tersedia karcis parkirnya, kalau parkir di luaran gak pernah saya minta.

Saya : Kalau bapak menggunakan fasilitas parkir, bapak pernah tidak membayar parkir tersebut?

Bapak : Kalau saya parkir, selalu saya bayar.

Saya : Menurut bapak parkir dan juru parkir itu penting gak?

Bapak : Penting sekali menurut saya, soalnya kalau kita memarkirkan kendaraan jika tidak ada juru parkir bisa jadi kendaraan kita hilang dan siapa mau tanggung jawab.

Saya : Apakah bapak pernah tidak mau membayar uang parkir?

Bapak : Tidak pernah.

Saya : Kalau tukang parkir meminta uang parkir tidak sesuai atau lebih banyak daripada biasanya, apa bapak tetap membayarnya?

Bapak : Tidak akan saya bayarlah, kecuali kalau di mall itukan tarifnya perjam kalau di luar gak akan saya bayar dan itu pun saya bayar sesuai yang seharusnya.

Saya : Pernah tidak bapak berdebat dengan tukang parkir masalah minta uang parkir?

Bapak : Tidak pernah sih, untuk apa berdebat kitakan make parkir yang dijaga mereka kalau sudah siap kita pake tempat parkirnya ya harus kita bayarlah.

4. Dokumentasi



Gambar 1. Suasana saat penulis mewawancarai Kepala Bidang Perparkiran.



Gambar 2. Bapak Indra Siregar, S.H selaku Kepala Bidang Perparkiran.



Gambar 3. Suasana parkir di depan Rumah Sakit Murni Teguh.



Gambar 4. Suasana saat penulis mewawancarai salah satu juru parkir di Jalan Jawa depan Rumah Sakit Murni Teguh.



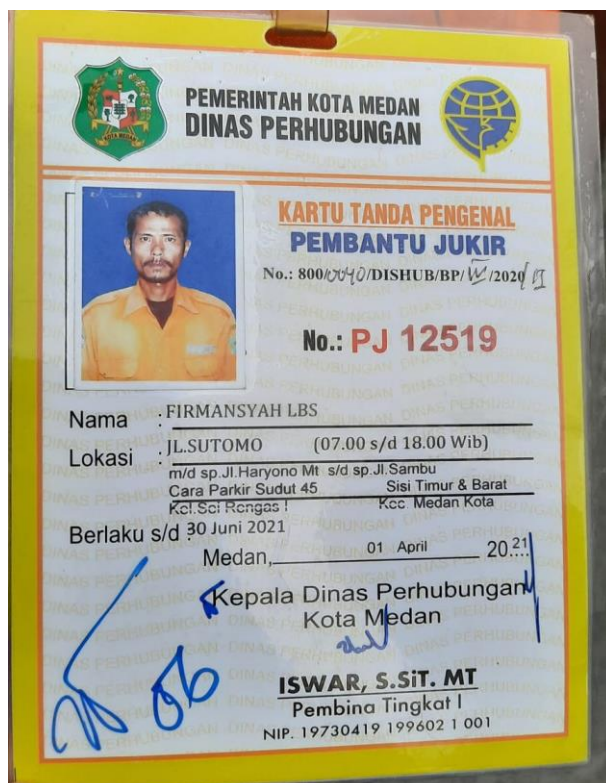
Gambar 5. Karcis parkir di perparkiran Rumah Sakit Murni Teguh.



Gambar 6. Kartu tanda pengenal juru parkir di depan Rumah Sakit Murni Teguh



Gambar 7. Suasana penulis mewawancarai salah satu juru parkir di Jalan Sutomo



Gambar 8. Kartu tanda pengenal juru parkir di Jalan Sutomo



Gambar 9. Suasana parkir di Jalan Sutomo



Gambar 10. Karcis parkir kendaraan roda dua di Jalan Sutomo